

2023



Trimegah Bangun Persada Tbk.

Group Sustainability Policy



DAFTAR ISI

Table of Contents

1 **Pendahuluan**
Introduction

1 **Cakupan**
Scope

1 **Kepatuhan Wajib**
Compliance required

2 **Dasar Kebijakan**
Basis of this policy

4 **1. Bisnis yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**
1. Business for Sustainable Development

4 **1.1 Strategi Perusahaan**
1.1 Corporate strategy

5 **1.2 Berkontribusi Terhadap Pencapaian Sasaran Pemerintah**
1.2 Contributing to Government Goals

6 **1.3 Kode Etik dan Perilaku**
1.3 Code of Ethics and Conduct

6 **1.4 Kepatuhan Terhadap Hukum**
1.4 Compliance with law

7 **1.5 Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia**
1.5 Respect for Human Rights

7 **1.6 Transparansi Pendapatan dan Pembayaran**
1.7 Revenue and Payments Transparency

8 **1.7 Kebijakan Antikorupsi**
1.7 Anti-Corruption Policy

9 **2. Penghormatan Terhadap Lingkungan**
2 Respect for the Environment

9 **2.1 Menilai dan Mengelola Dampak Kami**
Assessing and Managing our Impact

9 **2.2 Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem**
2.2 Protection of Biodiversity and Ecosystems

10 **2.3 Mengatasi Perubahan Iklim**
2.3 Addressing Climate Change

11 **2.4 Pengelolaan Air**
2.4 Water Management

13 **2.5 Menjaga Kualitas Udara**
2.5 Maintaining Air Quality

13 **2.6 Menghindari Kebisingan dan Getaran**
2.6 Avoiding Noise and Vibration

14 **2.7 Pengelolaan Limbah**
2.7 Waste Management

15 **2.8 Penutupan dan Reklamasi Tambang**
2.8 Mine Closure and Reclamation

16 **3. Ketentuan Ketenagakerjaan**
3. Employment Terms

16 **3.1 Kompensasi**
3.1 Compensation

16 **3.2 Jam Kerja dan Cuti**
3.2 Working hours and leave

16	3.3 Rekrutmen 3.3 Recruitment	24	6. Kepedulian Terhadap Rantai Pasokan 6. Care for our Supply Chain
17	3.4 Hak untuk Berserikat 3.4 Right to self-organise	24	6.1 Pengadaan yang Bertanggung Jawab 6.1 Responsible Procurement
18	4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 4. Occupational Health and Safety (OHS)	24	6.2 Memampukan Ketertelusuran Produk 6.2 Enabling Product Traceability
18	4.1 Sistem Manajemen K3 4.1 OHS Management System	26	7. Siklus Manajemen Risiko 7. Risk Management Cycle
18	4.2 Kesehatan Karyawan 4.2 Employees' health	26	7.1 Penilaian Risiko 7.1 Risk assessment
19	4.3 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat 4.3 Emergency Preparedness and Response	26	7.2 Konsultasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan 7.2 Consultation and Stakeholder Engagement
21	5. Mendukung Kelompok Masyarakat 5. Supporting Communities	27	7.3 Penetapan Sasaran dan Perencanaan Pengelolaan 7.3 Target Setting and Management Planning
21	5.1 Melindungi Kesehatan Masyarakat 5.1 Protecting Community Health	27	7.4 Pelatihan dan Sosialisasi 7.4 Training and Socialisation
21	5.2 Mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) 5.2 Securing Free, Prior and Informed Consent (FPIC)	28	7.5 Implementasi dan Inovasi 7.5 Implementation and Innovation
22	5.3 Menjaga Warisan Budaya 5.3 Maintaining Cultural Heritage	28	7.6 Dokumentasi dan Pemantauan 7.6 Documentation and Monitoring
22	5.4 Pengembangan Masyarakat 5.4 Community Development	28	7.7 Pemastian, Pengungkapan, dan Pelaporan 7.7 Assurance, Disclosure and Reporting
22	5.5 Pemukiman Kembali 5.5 Resettlement	29	7.8 Penyempurnaan yang Berkesinambungan 7.8 Continuous improvement
23	5.6 Tatalaksana Keamanan 5.6 Security Arrangements	29	7.9 Penanganan Pengaduan 7.9 Complaints handling

PENDAHULUAN

Introduction

Cakupan

Kebijakan Keberlanjutan ini ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris PT Trimegah Bangun Persada Tbk, yang bertanggung jawab atas kinerja keberlanjutan Perusahaan.

- Kebijakan ini berlaku untuk seluruh anak perusahaan dan afiliasi di bawah PT Trimegah Bangun Persada Tbk (“kami”, “Perusahaan”). Daftar semua entitas korporasi di bawah PT Trimegah Bangun Persada Tbk yang terbaru tersedia pada situs web kami.
- Operasi penambangan, peleburan, dan pemurnian kami di Kawasan Industri Pulau Obi dianggap sebagai aset prioritas Perusahaan.⁽⁷⁾
- Seluruh Mitra Usaha Ventura Bersama kami mendukung kebijakan keberlanjutan ini yang berlaku untuk kemitraan mereka dengan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. dan pemasok serta kontraktor mereka di Kawasan Industri Pulau Obi.
- Entitas korporat lainnya yang terkait dengan perusahaan akan dianggap sebagai pemasok PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Mereka wajib mengikuti Pedoman Perilaku Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) bagi Pemasok dan Kontraktor kami.
- Kebijakan ini berlaku selama lima tahun (2023–2027), dan selanjutnya kami akan mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dengan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan kami sebelum merilis pembaruan yang lengkap.
- Dari waktu ke waktu, Direksi dapat mempertimbangkan, menyetujui, dan mengadopsi amandemen dan pembaruan kebijakan. Setiap perubahan sementara terhadap Kebijakan Keberlanjutan ini akan diumumkan dan tersedia di situs web.

Kepatuhan Wajib

Ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Keberlanjutan ini dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi lingkungan, manusia, dan operasi kami. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk mematuhi kebijakan ini setiap saat.

- Semua direktur, komisaris, karyawan, kontraktor dan pemasok kami akan menerima materi sosialisasi mengenai maksud dan isi dari kebijakan ini.
- Semua pemasok dan kontraktor kami akan diwajibkan untuk menyatakan secara tertulis bahwa mereka akan mematuhi Kode Etik LST bagi Pemasok dan Kontraktor kami.
- Meskipun kami sangat mendorong profesionalisme dengan insentif positif, kami berhak untuk mengambil sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap Kebijakan Keberlanjutan kami.

Scope

This Sustainability Policy is signed off by PT Trimegah Bangun Persada Tbk’s Board of Directors and Board of Commissioners, who assume the responsibility for the Company’s sustainability performance.

- This policy applies to all subsidiaries and affiliation under PT Trimegah Bangun Persada Tbk (“we”, “the Company”). An up-to-date list of all corporate entities under PT Trimegah Bangun Persada Tbk is available on our website.
- Our mining, smelting and refining operations in the Obi Island Industrial Park are considered the Company’s prioritised assets.⁽¹⁾
- Our Joint Venture partners endorse this sustainability policy where it applies to their partnerships with PT Trimegah Bangun Persada Tbk. and their suppliers and contractors in the Obi Island Industrial Park.
- Other corporate entities related to company will be considered suppliers to PT Trimegah Bangun Persada Tbk. They are subject to our Supplier and Contractor ESG Code of Conduct.
- This policy applies for five years (2023–2027), after which we will evaluate the efficacy of this policy in consultation with our stakeholders prior to releasing a full update.
- From time to time, the Board may consider, approve and adopt policy amendments and updates. Any interim changes to this Sustainability Policy will be announced on the Company website.

Mandatory required

Non-compliance with this Sustainability Policy can have serious consequences for the environment, people and our operations. It is therefore of paramount importance that all parties adhere to this policy at all times.

- All our directors, commissioners, employees, contractors and suppliers will receive dissemination materials concerning the intent and content of this policy.
- All our suppliers and contractors will be required to confirm in writing that they will comply with our Supplier and Contractor ESG Code of Conduct.
- Whilst we strongly encourage professionalism with positive incentives, we reserve the right to resort to sanctions in the event our Sustainability Policy is violated. We will review each incident to determine its cause and perpetrator, if any.

¹ As referred to by the International Council on Mining and Metals (ICMM).

⁷ Berdasarkan International Council on Mining and Metals (ICMM).

Kami akan meninjau setiap insiden untuk menentukan penyebab dan pelakunya, jika ada. Permintaan tindakan korektif dan sanksi (yang mengikat secara hukum) dapat diterbitkan, yang sepadan dengan tindakan dan hasil yang tidak sesuai.

- Jika kegiatan kami diketahui menimbulkan risiko yang tidak terduga atau jika kegiatan kami berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan atau sosial yang tidak semestinya, maka manajemen akan meninjau situasi tersebut untuk mengambil tindakan korektif yang sesuai, yang mungkin termasuk menanggukkan kegiatan tersebut.

Dasar Kebijakan

Dokumen kebijakan ini didasarkan pada kebijakan dan praktik Perusahaan yang ada, hukum dan peraturan Indonesia dan standar internasional untuk penambangan, peleburan dan pemurnian yang bertanggung jawab, serta panduan untuk bidang-bidang kebijakan yang tematik dan kerangka kerja keberlanjutan yang menyeluruh, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kami mengakui bahwa pengembangan kebijakan kami berpatokan pada sejumlah dokumen panduan internasional berikut:

- 2022 Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) The TNFD Nature-related Risk and Opportunity Management and Disclosure Framework. Beta v0.3. ([tautan](#))
- 2022 Prinsip-prinsip dari International Council on Mining and Metals (ICMM) ([tautan](#))
- 2022 Kerangka Kerja Responsible Mining Index (RMI) 2020 untuk Responsible Mining Foundation (RMF) ([tautan](#))
- 2022 Prinsip Pemandu LST dari Automotive Industry Action Group (AIAG) ([tautan](#))
- 2021 Responsible Minerals Initiative (RMI): Risk Readiness Assessment (RRA) ([tautan](#))
- 2021 Global Battery Alliance (GBA) Passport ([tautan](#))
- 2021 Global Reporting Initiative (GRI) ([tautan](#))
- 2020 Prinsip Ekuator ([tautan](#))
- 2019 Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) ([tautan](#))
- 2018 Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) ([tautan](#))
- 2017 Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Recommendations. ([tautan](#))

Corrective action requests and (legally binding) sanctions may be issued, commensurate to the non-compliant action and outcome.

- In the event our activities are found to pose unforeseen risk or when our activities contribute to undue environmental or social harm, the management will review the situation to take appropriate corrective action, which may include suspension of said activity.

Basis of this policy

This policy document is based on the Company's existing policies and practices, Indonesian law and regulations and international standards for responsible mining, smelting and refining, as well as guidance for thematic policy areas and overarching sustainability frameworks such as the Sustainable Development Goals (SDGs). We acknowledge that the development of our policy has greatly benefitted from the following international guidance documents:

- 2022 Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) The TNFD Nature-related Risk and Opportunity Management and Disclosure Framework. Beta v0.3 Summary. ([link](#))
- 2022 International Council on Mining and Metals (ICMM) Principles ([link](#))
- 2022 Responsible Mining Foundation (RMF): Responsible Mining Index (RMI) Framework 2020 ([link](#))
- 2022 Automotive Industry Action Group (AIAG) ESG Guiding Principles ([link](#))
- 2021 Responsible Minerals Initiative (RMI): Risk Readiness Assessment (RRA) ([link](#))
- 2021 Global Battery Alliance (GBA) Passport ([link](#))
- 2021 Global Reporting Initiative ([link](#))
- 2020 Equator Principles ([link](#))
- 2019 Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ([link](#))
- 2018 Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) ([link](#))
- 2017 Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Recommendations. ([link](#))

1. BISNIS YANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Business for Sustainable Development

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menetapkan Kawasan Industri Pulau Obi sebagai Proyek Strategis Nasional, dengan mempertimbangkan kontribusi kawasan tersebut terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah di Indonesia. Industri-industri yang berada dalam kawasan industri tersebut akan juga berkontribusi terhadap kebijakan keberlanjutan yang ambisius dari Pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi perubahan iklim dengan mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan perluasan penggunaan kendaraan listrik (EV), baik pada skala domestik maupun internasional. Dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah ini, bersama dengan pertumbuhan yang pesat dalam permintaan pasar untuk baterai EV akan sangat dirasakan di Pulau Obi. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menempatkan keberlanjutan di pusat dari strategi perusahaan kami.

1.1 Strategi Perusahaan

Adalah visi kami untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya Perseroan untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi para pemegang saham, pemangku kepentingan, dan bangsa Indonesia. Misi kami didasarkan pada nilai-nilai inti Perseroan, yakni mewujudkan keunggulan yang berkelanjutan melalui peningkatan yang berkesinambungan dari kemampuan sumber daya manusia dan proses-proses industri.

Keberlanjutan merupakan kunci dari strategi perusahaan kami. Kami berjuang untuk mencapai sasaran jangka pendek dan juga jangka panjang; menjembatani prioritas-prioritas bisnis inti kami saat ini dan juga diversifikasi kesempatan berusaha. Pendekatan kami dalam hal keberlanjutan mencakup perlindungan lingkungan (dengan fokus yang semakin tajam pada perubahan iklim), menjunjung tinggi tata kelola perusahaan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

In 2020, the Government of Indonesia selected the Obi Island Industrial Park as a National Strategic Project. This, in view of its contributions to increasing Indonesia's economic growth, improving community welfare, and increasing regional development. The Park's industries will further contribute to the Indonesian government's ambitious sustainability policies to address climate change with the promotion of renewable energy and introduction of Electric Vehicles, domestically and overseas. The impact of these government policies and rapid growth in market demand for EV batteries will foremost be felt in Obi Island. It is therefore essential to place sustainability at the heart of our corporate strategy.

1.1 Corporate strategy

It is our vision to optimise the Company's resources to deliver the best possible contributions to our shareholders, stakeholders and the nation. Our mission is based on the Company's core values, which is to deliver sustainable excellence through continuous improvement of our human resource capabilities and industrial processes.

Sustainability is central to our corporate strategy. We strive to deliver against short-term and long-term goals; between our current core business priorities and the diversification of business opportunities. Our approach to sustainability incorporates environmental protection (with increasing focus on climate change), upholding good governance and protection of human rights.



1.2 Berkontribusi Terhadap

Pencapaian Sasaran Pemerintah

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengadopsi serangkaian kebijakan dan peraturan yang ambisius dalam hal pengolahan dalam negeri untuk penambahan nilai produk, pengembangan industri yang erat dengan sumber daya mineral, reduksi emisi gas rumah kaca, langkah-langkah penghematan energi, dan pengenalan kendaraan listrik kepada masyarakat.

- Sama seperti Pemerintah Indonesia, kami menyadari dampak keberlanjutan yang terkait dengan operasi kami dan perlunya mengelola berbagai risiko terkait dengan cermat. Kebijakan Keberlanjutan ini merupakan salah satu instrumen yang utama untuk mencapai hal tersebut.
- Kami merespons risiko yang terkait dengan gejolak politik melalui Tata Kelola Perusahaan yang Baik, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pendekatan yang jelas untuk aspek Keamanan. Di mana perlu, kami ikut dalam dialog yang dipimpin pemerintah tentang kebijakan dan peraturan.
- Kami memastikan bahwa kami memiliki semua izin yang

1.2 Contributing to Government

Goals

The Indonesian government has in recent years adopted a series of ambitious policies and regulations directed at domestic value added processing, industrial development close to mineral sources, reducing greenhouse gas emissions, energy saving measures and the introduction of electric vehicles.

- Along with the Government of Indonesia, we are aware of the sustainability impact associated with our operations and the need to manage risks carefully. This Sustainability Policy is one of the key instruments to achieve this.
- We address risks associated with political fragility through Good Corporate Governance, stakeholder engagement and a clear approach to Security. Where appropriate, we contribute to government-led dialogue about policies and regulations.
- We ensure that all necessary permits and government approvals are secured for all steps of our operations, encompassing planning, rehabilitation, environmental monitoring, and provision of medical services.

- diperlukan dan persetujuan dari pemerintah untuk semua kegiatan operasi kami, yang mencakup perencanaan, rehabilitasi, dan pemantauan lingkungan, hingga penyediaan layanan medis.
- Sebagai pemangku kepentingan yang signifikan di wilayah ini, kami akan berkontribusi secara konstruktif dalam proses perencanaan tata ruang Maluku Utara dan Pulau Obi dengan berbagi proposal dan penelitian mendasar dengan pemangku kepentingan lainnya, untuk dijadikan pertimbangan oleh pemerintah.
 - Kami akan terus berkontribusi terhadap penelitian dan pengembangan di bidang pertambangan dan kegiatan pengolahan terkait dan keberlanjutan di tingkat nasional dan internasional melalui presentasi berbagai makalah penelitian, berbagi data, dan dialog dengan pemangku kepentingan.

1.3 Kode Etik dan Perilaku

- Kode Etik dan Perilaku kami menguraikan prinsip-prinsip utama Perusahaan, yakni:
 - Tata kelola yang baik, termasuk kepatuhan terhadap prinsip dan praktik terbaik di bidang akuntansi dan operasi, serta komunikasi yang jelas, objektif, dan tepat waktu dengan pemegang saham dan investor.
 - Perlindungan hak asasi manusia dan peningkatan kesejahteraan, serta jaminan kesehatan dan keselamatan di seluruh wilayah operasional.
 - Pencapaian hasil usaha sesuai dengan tanggung jawab sosial komersial: bertindak secara bertanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan dalam segala keadaan, dan berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasional dan Indonesia secara keseluruhan.
- Seluruh anggota Direksi, pekerja, dan pegawai magang di Perusahaan wajib menandatangani Kode Etik dan Perilaku.
- Kepatuhan terhadap Kode Etik ini diawasi oleh beberapa komite khusus, yaitu:
 - Nominasi dan Remunerasi,
 - Etik dan Risiko, serta
 - Keberlanjutan dan Keberagaman.
- Kode Etik dan Perilaku Perusahaan tersedia untuk umum pada situs web Perusahaan.

1.4 Kepatuhan Terhadap Hukum

Kepatuhan terhadap undang-undang di Indonesia adalah landasan bagi komitmen keberlanjutan kami. Kami menyambut baik kebijakan dan peraturan ambisius yang telah pemerintah tetapkan.

- Kami berkomitmen untuk senantiasa mematuhi hukum dan peraturan Indonesia yang berlaku. Komitmen serupa juga kami wajibkan bagi seluruh pemasok dan kontraktor kami.
- Apabila terdapat pertentangan dalam persyaratan hukum dan kebijakan dalam negeri, maka kami akan memprioritaskan kepatuhan terhadap hukum/peraturan yang paling berpihak

- As a significant stakeholder in the region, we will constructively contribute to the spatial planning process for North Maluku and Obi Island by sharing proposals and underlying research with other stakeholders for the government's consideration.
- We will continue to contribute to research and development (R&D) in the field of mining and the related processing activities and sustainability at national and international level through presentation of research papers, sharing of data and stakeholder dialogue.

1.3 Code of Ethics and Conduct

- Our Code of Ethics and Conduct outlines the Company's main principles:
 - Good governance, including adherence to principles and best practices of accounting and operations, and clear, objective and timely communication with shareholders and investors.
 - Protection of human rights and enhanced welfare, along with security of health and safety in all operational areas.
 - Achieving business results in accordance with commercial social responsibility: acting responsibly towards social and environmental issues under all circumstances, and contributing to the development of communities around operational areas, as well as Indonesia as a whole.
- All members of the Board of Directors, workers and apprentices in the Company are required to sign the Code Ethics and Conduct.
- Adherence to the Code of Conduct is overseen by dedicated committees, namely:
 - Nomination and Remuneration,
 - Ethics and Risk, and
 - Sustainability and Diversity
- The Company Code of Ethics and Conduct is publicly available on the Company website.

1.4 Compliance with Law

Compliance with Indonesian law is the foundation on which our commitment to sustainability is built. We welcome the ambitious policies and regulations set out by the government.

- We commit to complying with applicable Indonesian law and regulations at all times. We require the same from our suppliers and contractors.
- Should domestic legal or policy requirements be deemed conflicting, then we will prioritise adherence to the law or regulation that favours environmental and social interests the most.

- kepada kepentingan lingkungan dan sosial.
- Apabila terjadi insiden ketidakpatuhan yang dapat dikonfirmasi, kami akan segera mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan tersebut dan/atau memitigasi konsekuensinya.
 - Kami melaporkan kepada publik jumlah dan sifat dari insiden ketidakpatuhan yang signifikan yang telah dituduhkan atau dikonfirmasi, apabila ada.
 - Kami memantau dan, apabila perlu, memperbarui kebijakan dan/atau SOP kami untuk mematuhi undang-undang dan peraturan internasional terkait dengan komoditas yang cenderung dianggap sensitif secara lingkungan dan sosial.

1.5 Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia

Komitmen kami untuk menegakkan hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional tertanam dalam seluruh aspek kebijakan dan operasi Perusahaan.

- Kami meninjau risiko pelanggaran hak asasi manusia secara keseluruhan dalam operasi kami setidaknya setiap satu tahun sekali.
- Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersebut, kami akan menangguhkan kegiatan tersebut, menyelidiki kasus dan penyebabnya, mengupayakan pemulihan dari dampak yang telah dikonfirmasi, serta mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran tersebut terulang kembali.

1.6 Transparansi Pendapatan dan Pembayaran

Kami berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi dari Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), sebagai berikut:

- Struktur kepemilikan manfaat dari Perusahaan dapat diakses oleh publik pada situs web kami. Pembaruan terhadap struktur tersebut dilaporkan melalui pengumuman ke Bursa Efek dan dirangkum setiap tahunnya dalam laporan tahunan kami.
- Persyaratan kontraktual untuk operasi pertambangan dan industri kami dijabarkan dalam izin formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Kami akan menanggapi permintaan yang muncul akan informasi dalam batasan dan kondisi tertentu, sejauh permintaan tersebut dapat dibenarkan.
- Peta wilayah operasional tambang kami dapat dilihat pada situs web "[Mineba One Map](#)" dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).
- Kami menerbitkan laporan keuangan tahunan kami sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK), yang telah diselaraskan dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS).
- Kami melakukan tinjauan tahunan terhadap kerangka pelaporan yang tersedia untuk menentukan prioritas pengumpulan dan agregasi data tambahan untuk meningkatkan kualitas pelaporan publik kami sehubungan dengan transparansi pendapatan dan pembayaran.

- In the event of confirmed non-compliance, we will immediately take measures to halt the activity and/or mitigate its consequences.
- We publicly report on the number and nature of major alleged or confirmed non-compliance incidents, if any.
- We monitor and, if so required, update our policies and/or SOPs to comply with international laws and regulations with regards to commodities with environmentally and socially sensitive profiles.

1.5 Respect for Human Rights

Our commitment to uphold internationally recognised human rights is engrained in all aspects of the Company policy and operations.

- We review overall risk of human rights violations in our operations at least annually.
- In the event of a breach of basic rights, we will suspend relevant activities, investigate the case and its causes, provide remedy for confirmed impact and take measures to prevent repeat offense.

1.6 Revenue and Payments Transparency

We commit to meeting the expectations of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), as follows:

- The beneficial ownership structure of the Company is publicly accessible on our website. Updates are reported through announcements to the Stock Exchange and summarised annually in our annual reports.
- The contractual terms for our mining and industrial operations are laid out in formal licences issued by the Government of Indonesia based on prevailing laws and regulations. We will address justified requests for insight in specific terms and conditions as they may arise.
- Maps of our operational mining areas can be found on the [Minerba "One Map"](#) website.
- We publish our annual accounts in line with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which has been closely aligned to International Financial Reporting Standards (IFRS).
- We conduct annual reviews of available reporting frameworks to determine priorities for additional data collection and aggregation to enhance our public reporting with regards to revenue and payments transparency.

1.7 Kebijakan Antikorupsi

- Kebijakan Anti Suap/Gratifikasi, Korupsi, dan Pencucian Uang ('Kebijakan Anti Suap') kami melarang Direksi, Komisaris, Manajer dan karyawan lainnya di Perusahaan untuk terlibat dalam segala bentuk penyuapan/gratifikasi, korupsi, dan pencucian uang di lingkungan kerja kami.
- Kebijakan tersebut juga berlaku bagi semua mitra bisnis, kontraktor, subkontraktor, konsultan, agen, dan pemasok lainnya. Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Seleksi Pemasok atau Vendor kami mewajibkan para mitra, pemasok, dan vendor kami untuk menandatangani Pakta Integritas yang diterbitkan oleh Perusahaan.
- Seperti semua komponen lainnya dalam kebijakan kami, implementasi kebijakan antikorupsi ini diperkuat oleh proses penilaian risiko (lihat Bab 7).

1.7 Anti-Corruption Policy

- Our Anti Bribery/Gratification, Corruption and Money Laundering Policy ('Anti-Bribery Policy') prohibits the Company Directors, Commissioners, Managers and other employees to be involved in any form of bribery/gratification, corruption and money laundering in our working environment.
- The aforementioned policy also applies to all business partners, contractors, subcontractors, consultants, agents and other suppliers. Our Supplier or Vendor Performance Improvement and Selection Policy requires our partners, suppliers and vendors to sign an Integrity Pact issued by the Company.
- As in all components of our policy, our anti-corruption policy implementation is enabled by our risk assessment process (see Chapter 7).

2. PENGHORMATAN TERHADAP LINGKUNGAN

Respect for the Environment

2.1 Menilai dan Mengelola Dampak Kami

Semua operasi penambangan dan pemrosesan kami berlangsung di daratan. Semua itu menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan industri yang melibatkan berbagai perusahaan lain dan lembaga pemerintah. Kami mengakui pentingnya mempertimbangkan dampak kami dalam konteks lanskap yang lebih luas.

- Strategi ekspansi kami di Pulau Obi akan dipandu oleh Penilaian Risiko Alam Tingkat Lanskap (LNRA) untuk mengidentifikasi area yang 'tidak boleh dibuka' dan 'potensi dibuka', dengan mempertimbangkan karakteristik lanskap, alokasi izin, dan potensi dampak dari kegiatannya, apabila kegiatan tersebut dilakukan.
- Sejalan dengan persyaratan hukum di Indonesia, kami akan melakukan Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) secara terperinci untuk setiap kegiatan pembangunan dan kegiatan lainnya yang memerlukan Izin Lingkungan.⁽⁸⁾ Kami tidak akan memulai kegiatan yang dilarang di lapangan sebelum memperoleh Izin Lingkungan yang sesuai.
- Selama penilaian dampak, kami akan memastikan untuk mendengarkan pendapat dari kelompok masyarakat lokal rentan yang berpotensi terkena dampak, dan memastikan kepentingan mereka dipertimbangkan dengan semestinya.
- Ringkasan dari ESIA yang signifikan akan ditampilkan dan dilengkapi dengan sarana untuk menyampaikan komentar.
- Hasil studi LNRA dan ESIA serta persyaratan perizinan akan diintegrasikan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) tingkat Grup untuk jangka panjang, yang disusun dengan mengacu pada sertifikasi ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan).

2.2 Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Terdapat beberapa risiko alam tertentu yang berkaitan dengan operasi kami dalam lingkup ekosistem yang sensitif dan sebagian besar masih lestari: hutan tropis, danau air tawar di pulau, dan lingkungan laut, yang merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang Dunia. Kami berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dampak lokal kami terhadap keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem dapat dikelola dengan baik, dan sebagian besar dapat dipulihkan.

2.1 Assessing and Managing Our Impact

All our mining and processing operations are land-based. They are part of a development plan for an industrial park that involves other companies and government agencies. We acknowledge the importance of considering our impacts in the context of the wider landscape.

- Our expansion strategy on Obi Island will be guided by a Landscape-level Nature Risk Assessment (LNRA) to identify 'no-go' and 'potential go' areas, taking into account the landscape characteristics, permit allocations and the potential impacts of our activities should they take place.
- In line with legal requirements in Indonesia, we will commission detailed Environmental and Social Impact Assessments (ESIA) for every development and activity that requires an Environmental Permit.⁽⁸⁾ No prohibited activities will commence on the ground before the Environmental Permit is secured.
- During impact assessment, care will be taken to ensure that potentially affected vulnerable local communities are duly heard, and that their interests taken into account.
- A summary of significant ESIA's will be made available including the opportunity to submit comments.
- The results of the LNRA and ESIA studies and permit terms will be integrated in our long-term Group-level Environmental Management Plan (EMP), which is subject to ISO 14001 (Environmental Management System) certification.

2.2 Protection of Biodiversity and Ecosystems

Certain nature risks are associated to our operations in sensitive and mostly intact ecosystems: tropical forests, island-based freshwater lakes and the marine environment, which is part of the Coral Triangle. We strive to demonstrate that our local impact on biodiversity and ecosystem services is manageable and mostly recoverable.

² In line with legal requirements in Indonesia and international standards, detailed Environmental and Social Impact Assessments (ESIA) are commissioned to accredited experts prior to the start of any significant activities on the ground. The process includes baseline data collection, risk and impact assessment, a monitoring and impact mitigation plan, review by a multistakeholder panel and final issuance of an Environmental Permit which stipulates the terms of approval. This process is fully documented and includes follow up reporting to the relevant government authorities.

⁸ Sejalan dengan persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia dan standar-standar internasional, Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) yang terperinci akan diminta untuk dilakukan oleh para pakar yang terakreditasi sebelum kami memulai kegiatan yang signifikan di lapangan. Prosesnya mencakup pengumpulan data awal, penilaian risiko dan dampak, rencana pemantauan dan mitigasi dampak, kajian oleh suatu panel yang beranggotakan banyak kelompok pemangku kepentingan, dan akhirnya penerbitan Izin Lingkungan yang menjelaskan syarat-syarat persetujuannya. Proses ini didokumentasi secara utuh dan mencakup pelaporan lanjutannya untuk diserahkan kepada otoritas pemerintahan yang relevan.

- Kami akan mengembangkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang mengarahkan upaya Perusahaan ke depan untuk melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati di ekosistem laut, danau, dan daratan. Rencana tersebut akan menetapkan persyaratan minimum untuk upaya perlindungan dan pengelolaan.
- Tidak ada operasi kami yang tumpang tindih dengan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, baik di saat ini maupun di masa depan. Kami menghindari konversi hutan primer (tidak pernah ditebang sebelumnya) dan kami tidak akan melakukan penambangan formasi bukit karst (Kelas I).
- Kami akan mematuhi rekomendasi penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) yang telah menjalani proses penelaahan sejawat sebelum memulai operasi penambangan dan/atau pembuangan tailing ke area di mana terdapat risiko yang tinggi terhadap keberlanjutannya.
- Sebagai bagian dari tujuan kami untuk mewujudkan konservasi daratan secara neto dalam waktu 20 tahun, kami akan menanam kembali area yang sebelumnya ditambang, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, mengelola setidaknya 30% ruang hijau di Kawasan Industri Pulau Obi, mendukung pemulihan hutan bakau, serta mendukung penciptaan kawasan konservasi yang lebih besar dan dikelola dengan baik di sekitar operasi kami atau secara ex-situ apabila ada.
- Kami akan mempertimbangkan untuk mengompensasi (*offset*) sebagian dari emisi karbon kami melalui program 2030 Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink Indonesia, yang juga berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati.
- Kami berkomitmen untuk melindungi dan memulihkan lingkungan laut pada lokasi-lokasi kritis, misalnya melalui reboisasi bakau, pembuatan terumbu karang buatan, pemulihan padang lamun, dan pelibatan komunitas nelayan.
- Program Kelautan kami akan memantau kualitas terumbu karang yang teridentifikasi dan lingkungan laut sensitif lainnya, seperti padang lamun di sekitar operasi penambangan kami. Kami membandingkan temuan kami dengan informasi dari situs referensi yang representatif. Apabila Perusahaan atau pakar eksternal mendeteksi adanya penurunan kualitas, kami akan menggunakan pendekatan ilmiah untuk menentukan kemungkinan penyebabnya dan memitigasi dampaknya sesuai dengan yang direkomendasikan.
- Karyawan kami dilarang terlibat dalam perburuan dalam bentuk apa pun dan mengumpulkan hasil hutan yang terancam punah. Olahraga memancing diperbolehkan untuk spesies kehidupan laut yang tidak terancam punah, selama tidak melanggar peraturan nasional.
- We will develop a Biodiversity Management Plan that directs the Company's future efforts to protect and restore biodiversity in marine, lacustrine (lake) and terrestrial ecosystems. The plan will set minimum requirements for protection and management.
- None of our operations overlap with existing legally protected areas, at present and in future. We avoid conversion of primary (not previously logged) forests and we will not contribute to mining of (Class I) karst hill formations.
- We will adhere to the recommendations of peer reviewed High Conservation Value (HCV) assessments prior to commencing mining operations and/or tailings disposal in sustainability high-risk areas.
- As part of our goal to deliver net terrestrial conservation gain within 20 years, we will revegetate previously mined areas as required by law, manage at least 30% green space in the Obi Island Industrial Park, support the restoration of mangroves and promote the creation of larger, well-managed conservation areas in the vicinity of our operations or ex-situ where appropriate.
- We will consider offsetting part of our carbon emissions through the Indonesian 2030 Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink program, which also contributes to biodiversity conservation.
- We commit to protecting and restoring the marine environment in critical sites, such as through mangrove reforestation, the creation of artificial coral reefs, restoration of sea grass beds and engagement with fishing communities.
- Our Marine Program will monitor the quality of the identified coral reefs and other sensitive marine environments such as seagrass beds in the vicinity of our mining operations. We compare findings with those from representative reference sites. In the event a decline in quality is detected by the Company or external experts, we will uphold the scientific approach to determine the likely cause and mitigate impacts in line with the recommendations.
- Our employees are prohibited from engaging in hunting of any kind and gathering of endangered forest products. Sports fishing is allowed for non-endangered species of marine life and provided national law is respected at all times.

2.3 Mengatasi Perubahan Iklim

Perseroan sangat peduli dengan isu pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat global. Kami sepenuhnya mendukung visi pemerintah Indonesia untuk menihilkan emisi gas rumah kaca (GRK) secara neto pada tahun 2060 atau lebih awal. Untuk membantu membatasi pemanasan global di atas 1,5°C,

2.3 Addressing Climate Change

The Company shares a deep concern over global warming and its impact on the global community. We fully support the Indonesian government's vision to achieve net zero emissions of greenhouse gasses (GHG) by 2060 or sooner. To help limiting global warming beyond 1.5°C, we acknowledge the need for our company to

kami mengakui bahwa Perusahaan perlu berkontribusi terhadap pencapaian target nasional Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% pada tahun 2030, dan juga terhadap tujuan pemerintah untuk meningkatkan porsi pembangkitan energi dengan energi terbarukan menjadi 23% dari total pada tahun 2025.

Kajian Emisi GRK dan Penetapan Target

- Kami menilai dan memperbarui studi emisi GRK secara teratur yang timbul dari setiap tahapan dari proses produksi kami (Cakupan 1, 2 dan 3).
- Kami akan melakukan penilaian risiko iklim yang terperinci, termasuk analisis skenario dan peninjauan struktur tata kelola kami.
- Kami akan menjalankan pendekatan ilmiah untuk menetapkan target yang dapat dicapai dan cukup ambisius untuk reduksi emisi GRK, peluang di bidang energi terbarukan, dan kompensasi emisi karbon, selambat-lambatnya pada triwulan ketiga tahun 2023.

Tindakan Prioritas untuk Konservasi Energi dan Tangkapan Karbon

- Sejalan dengan target pemerintah untuk memperkenalkan energi terbarukan, kami akan memasang pembangkit listrik tenaga surya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Analisis Dampak Lingkungan tersendiri.
- Kami memprioritaskan reduksi emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik kami per unit output, dengan mengoptimalkan efisiensi penggunaan bahan bakar, antara lain melalui pembangunan lini produksi *semi-coke* untuk pabrik *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF).
- Kami akan meningkatkan penggunaan campuran biodiesel (B35-40) untuk bahan bakar pembangkit listrik dan moda transportasi, sejalan dengan kebijakan pemerintah.
- Kami akan mempertimbangkan untuk mengganti moda transportasi yang lama dengan kendaraan listrik dan *hybrid*.
- Kami berupaya untuk meningkatkan efisiensi pembangkitan listrik dengan penggunaan batubara berkalori tinggi, penggunaan sulfur secara lebih baik, dan tungku yang lebih baik.
- Kami akan mengidentifikasi berbagai peluang untuk mengompensasi emisi GRK sisanya melalui program 2030 Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink Indonesia.

2.4 Pengelolaan Air

Air dalam jumlah besar digunakan dalam operasi kami; oleh karena itu, kami menyadari pentingnya melindungi pasokan air bagi operasi kami, masyarakat lokal, dan alam. Kendati sebagian penggunaan air tawar kini telah digantikan oleh air laut, optimalisasi penggunaan air dan pengelolaan kualitas air limbah menjadi prioritas jangka pendek kami; sementara untuk jangka menengah, kami berupaya meningkatkan proporsi air yang kami daur ulang.

Rencana Pengelolaan Air

Kami akan mengembangkan dan menerapkan Rencana

contribute to the Indonesian national target of reducing GHG emissions by 31.89% in 2030 and the government's goal to achieve 23% energy generation with renewables by 2025.

GHG Emissions Assessment and Setting of Targets

- We assess and regularly update studies into GHG emissions arising from each stage of our production processes (Scope 1, 2 and 3).
- We will conduct a detailed climate risk assessment, including a scenario analysis and review of our governance structure.
- We will follow a science-based approach to set achievable and adequately ambitious targets for GHG emission reductions, renewable energy options and carbon offsetting, no later than by Q3-2023.

Priority Actions for Energy Conservation and Carbon Capture

- In line with the government's target for the introduction of renewable energy, we will install solar power facilities, taking into account the recommendations of a separate Environmental Impact Assessment.
- We prioritise the reduction of our power plants' greenhouse gas emissions per unit of output by optimizing efficiency in fuel usage, among others through the construction of a semi-coke production line for the Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) plant.
- We will increase the use of biodiesel mixtures (B35-40) in our power plant and transportation equipment in line with government policy.
- We will consider replacing old transportation equipment with EVs and hybrids.
- We strive to increase the efficiency of electricity generation with the use of high(er) calorie coal, better use of sulphur and better furnaces.
- We will identify options for offsetting remaining GHG emissions through the Indonesian 2030 Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink program.

2.4 Water Management

Considerable volumes of water are used in our operations; we therefore recognise the importance of protecting water supply for our operations, local communities and nature. Whereas a portion of our freshwater usage is already being replaced by seawater, optimizing water usage and managing quality of discharged water is our short term priority; achieving a high rate of water recycling is our medium term goal.

Water Management Plan

We will develop and implement an integrated Water Management

Pengelolaan Air terpadu untuk semua operasi kami, sejalan dengan kewajiban hukum dan strategi Pengelolaan Lingkungan Perusahaan.

Air dalam Operasi Penambangan

- Kami melakukan studi hidrologi sebelum penambangan dan setelah reklamasi, dengan tujuan untuk menghindari longsor dan erosi yang berlebihan.
- Pembasahan jalan dan tumpukan bijih untuk mengurangi debu diperlukan, namun kami akan menghindari penggunaan air yang berlebihan dan pengangkutan materi tanah basah.
- Tidak satu pun dari operasi kami menghasilkan air asam tambang (*acid rock drainage—ARD*).

Penggunaan dan Pembuangan Air Industri

Penggunaan air bersih untuk fasilitas smelter dan fasilitas karyawan kami telah sesuai izin pemerintah dan kami membayar untuk pengambilannya dari beberapa danau dan sungai di sekitar wilayah operasi kami.

- Kami melakukan studi hidrologi dasar untuk setiap sumber air, untuk memungkinkan pemantauan kualitas air danau dan muka air tanah. Kami berkomitmen untuk mencegah penurunan permukaan air yang terus-menerus dalam jangka panjang di setiap danau dan badan air lainnya di daratan, yang kami gunakan sebagai sumber air.
- Kami memastikan bahwa penggunaan dan pembuangan air laut menghasilkan dampak jangka panjang yang minimal terhadap lingkungan laut. Kami menerapkan serangkaian filter (untuk air yang kami ambil) dan dengan menjaga suhu air yang dilepas ke badan air agar tidak mengakibatkan pemutihan karang yang parah.
- Air residu dari fasilitas HPAL, entitas asosiasi kami, sepenuhnya dinetralkan dan diproses lebih lanjut pada instalasi pengolahan air limbah kami sebelum dibuang.
- Kami akan menilai kelayakan dari tujuan kami untuk mewujudkan sistem loop tertutup untuk mencapai tingkat daur ulang air yang lebih tinggi.
- Kami akan memulai inisiatif untuk menggunakan kembali dan mendaur ulang air dari Instalasi Pengolahan Air Limbah kami, dan untuk meningkatkan kualitas pembuangan air.
- Untuk memantau kualitas air, kami mempekerjakan kapal survei dengan peralatan yang terakreditasi dan staf yang berkualifikasi.

Air Rumah Tangga

- Kami memastikan bahwa karyawan kami dan masyarakat di sekitar operasi kami memiliki akses yang berkelanjutan ke air minum yang cukup dan bersih dari sumber-sumber alami.
- Kami akan menerapkan program khusus untuk identifikasi dan perlindungan mata air dan sumur.
- Semua kawasan perumahan baru akan dilengkapi dengan fasilitas air limbah.

Pengendalian Erosi Tanah

- Selama hujan deras terdapat risiko timbulnya limpasan

Plan for all our operations, in line with legal obligations and the Company's Environmental Management strategy.

Water in Mining Operations

- We conduct hydrology studies prior to mining and after reclamation with the aim to avoid landslides and excessive erosion.
- Wetting of roads and ore stacks to reduce dust is necessary but excessive water use and transportation of wet soil matter is to be avoided.
- None of our operations shall result in Acid Rock Drainage (ARD).

Industrial Water Intake and Discharge

Subject to government permits and payment for usage, freshwater for our smelter facilities and employees' facilities is sourced from several lakes and rivers in the vicinity of our operations.

- We conduct baseline hydrology studies for every water source, to enable monitoring of lake water quality and water tables. We commit to preventing a long-term sustained decline in water levels in every lake and other inland water bodies that we source from.
- We ensure that sea water intake and discharge have minimal lasting impact on the marine environment. We do so with a series of filter screens (water intake) and by keeping discharge water temperature at levels that do not result in aggravated coral bleaching.
- Residual water from our associate High Pressure Acid Leach (HPAL) facility is completely neutralised and further processed in our waste water treatment plant prior to discharge.
- We will assess the viability of our goal to achieve near-closed-loop systems to achieve a higher water recycling rate.
- We will commence initiatives to reuse and recycle water from our Wastewater Treatment Plant, and to increase the quality of water discharge.
- To monitor water quality, we employ survey vessels with accredited equipment and qualified staff.

Household Water

- We ensure that our employees and communities in the vicinity of our operations have continuous access to ample, clean drinking water from natural sources.
- We will implement a program dedicated to the identification and protection of springs and wells.
- All new housing will be fitted with waste water facilities.

Soil Erosion Control

- There is a risk of unacceptable level of soil runoff during

tanah pada tingkat yang terlalu tinggi untuk dapat diterima. Kami akan meninjau dan menyesuaikan proses perencanaan konstruksi industri dan mengambil tindakan untuk mengurangi limpasan tanah dan debu secara signifikan. Kami akan melakukannya antara lain dengan membangun jalan permukaan secara lebih awal, memperkuat dinding dengan batu bata terak nikel, melakukan studi hidrologi tambahan, membangun kolam retensi dan sedimen, serta menanam tanaman penutup dalam jumlah yang lebih banyak.

2.5 Menjaga Kualitas Udara

Risiko utama terhadap kualitas udara timbul dari debu dari kegiatan penambangan dan pengangkutan, dan abu terbang dari pembangkit listrik kami. Kami menyadari risiko yang terkait dengan kesehatan, sehingga kami berkomitmen untuk menjaga emisi dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sebagai berikut:

- Untuk mengurangi debu, kami membasahi jalan dan mulut tambang terbuka secara teratur untuk mengurangi debu. Selanjutnya, kami akan menyesuaikan proses perencanaan konstruksi kami: lihat "Pengendalian Erosi Tanah".
- Kami memantau emisi gas buang SO₂, NO_x, CO dan lainnya dari cerobong asap dan generator dengan alat *Continuous Emissions Monitoring System* (CEMS) setiap enam bulan sekali, untuk mengoptimalkan fungsi motor dan efisiensi bahan bakar. Pemeliharaan preventif dilakukan secara teratur pada peralatan dan kendaraan untuk memastikan efisiensi. Mesin-mesin diganti apabila ada indikasi bahwa standar-standar emisi kerap terlampaui.
- Kami secara rutin merawat dan mengganti filter *Electro Static Precipitator* (ESP) kami dan membersihkan filter belakang di silo *Fly Ash Bottom Ash* (FABA) di pembangkit listrik kami. Kami berhasil menangkap sekitar 98,8% dari semua debu yang dihasilkan.
- Kami berencana menghentikan penggunaan bahan bakar diesel apabila memungkinkan, antara lain dengan mulai menggunakan panel surya dan EV.
- Semua fasilitas insinerasi limbah untuk rumah tangga dan limbah industri tertentu telah kami lengkapi dengan pengumpul debu.

2.6 Menghindari Kebisingan dan Getaran

- Semua lokasi tambang operasional kami, serta di fasilitas dan infrastruktur smelter, terletak berjarak aman dari perumahan karyawan dan desa, sesuai persyaratan undang-undang.
- Kebijakan K3 kami mengharuskan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di pembangkit listrik dan fasilitas smelter kami, di mana kebisingan dan getaran akan melampaui batasan yang wajar apabila APD tidak digunakan.

heavy rains. We will review and adjust the planning process of industrial construction and take measures to significantly reduce soil runoff and dust. We will do so, among other, by early construction of surfaced roads, strengthening of walls with nickel slag bricks, additional hydrology studies, the construction of retention and sediment ponds, and extra planting of ground cover crops.

2.5 Maintaining Air Quality

The main risk to air quality is associated with dust from mining and transport and fly ash from our power plants. We recognise the associated health risks and commit to keeping emissions within legal norms, as follows:

- To reduce dust, we practice regular wetting of roads and open pit sites to reduce dust. Furthermore, we will adjust our construction planning process: see "Soil Erosion Control".
- We monitor exhaust gas emissions of SO₂, NO_x, CO and others from chimneys and generators with our Continuous Emissions Monitoring System (CEMS) tool every six months to optimise motor functioning and fuel efficiency. Preventive maintenance is regularly conducted on equipment and vehicles to ensure efficiency. Machinery is replaced when emission standards are at risk of being regularly exceeded.
- We regularly maintain and replace the filters of our Electro Static Precipitator (ESP) and clean the back filter in the Fly Ash Bottom Ash (FABA) silo in our power plants. Therefore, 98.8% of all dust is captured.
- We aim to phase out the use of diesel fuel wherever viable. This will partially be achieved through the introduction of solar energy and EVs.
- All our waste incineration facilities for household and selected industrial waste are equipped with dust collectors.

2.6 Avoiding Noise and Vibration

- All our operational mining sites, smelter facilities and infrastructure are located at safe distance from employee housing and villages, in line with legal requirements.
- Our OHS policy enforces the use of Personal Protective Equipment (PPE) in our power plants and smelting facilities where noise and vibration exceed norms without such protection.

2.7 Pengelolaan Limbah

Kami telah mengidentifikasi semua bentuk limbah berbahaya dan tidak berbahaya yang dihasilkan dalam operasi kami, dan mengelola setiap kategorinya sesuai dengan prinsip *Reduce-Reuse-Recycle* (3R), apabila memungkinkan. Kami tidak menerapkan sistem Penempatan *Tailing* Laut Dalam (DSTP).

Pertambangan dan Limbah Industri

- Proses di HPAL menghasilkan *slurry* yang setelah dinetralkan menghasilkan air yang dapat dibuang ke badan air dan *tailing* tumpukan kering. Setelah kami memverifikasi bahwa *tailing* memenuhi semua persyaratan uji toksisitas, *tailing* akan ditangani sebagai limbah industri dari Sumber Spesifik Khusus (tidak beracun, tidak mudah terbakar, tidak dapat meledak, reaktif, atau korosif).
- *Tailing* dari HPAL sebagian besar disimpan di lokasi tambang. Namun, jika kami menerima usulan untuk membuang *tailing* ke *Dry Stack Tailings Facilities* (DSTF) lainnya yang telah disetujui secara hukum, kami akan memastikan bahwa proses pemilihan lokasinya memastikan bahwa penyimpanannya aman dan bahwa dampak terhadap nilai konservasi yang teridentifikasi dapat dikelola dan/atau dikompensasi.
- Smelter RKEF menghasilkan terak nikel. Ini adalah produk sampingan yang penggunaannya baik secara ekonomis maupun non-ekonomis sedang dikembangkan. Jika kecepatan produksi terak nikel lebih tinggi daripada kecepatan penggunaannya, maka terak nikel akan disimpan di area yang diizinkan untuk ditambang dan area yang tidak ditambang (yakni fasilitas pembuangan terak nikel atau NSDF).
- Studi kelayakan yang mencakup stabilitas lereng akan dilakukan untuk memastikan semua risiko yang terkait untuk DSTF dan NSDF telah dievaluasi, dan bahwa semua rekomendasinya telah diterapkan. Kami akan mengikuti praktik terbaik internasional untuk memantau aspek keselamatannya dan penutupan fasilitasnya.
- Sejalan dengan program konservasi mineral dari pemerintah, kami secara berkala meninjau peluang untuk menurunkan *Cut-off Grade* dari tambang kami dengan mempertimbangkan teknologi peleburan dan nilai ekonomis.
- Kami menggunakan kembali semua abu terbang dan abu padat dari fasilitas pengolahan. Abu dicampur dengan terak nikel untuk dibentuk menjadi berbagai produk sampingan yang dapat dimanfaatkan, atau dijadikan penambah nutrisi untuk penanaman, sebelum penimbunan kembali untuk memperkuat konsistensi pasta. Abu juga digunakan untuk memproduksi terumbu karang buatan.
- Kami mengevaluasi, mengelola, dan memantau risiko-risiko yang terkait dengan penimbunan kembali, antara lain studi air asam tambang, perolehan izin yang diperlukan, penilaian stabilitas geoteknik, dan pemantauan air permukaan dan air tanah di sekitar area penimbunan kembali.
- Limbah berbahaya, seperti limbah minyak, limbah kimia dan medis, limbah radioaktif dari klinik, laboratorium, dan bengkel, disimpan dengan aman di depot khusus sebelum diproses oleh pihak ketiga yang telah disetujui dan terakreditasi di luar Pulau Obi.

2.7 Waste Management

We have identified all forms of hazardous and non-hazardous waste generated in our operations and we manage each category according to the Reduce-Reuse-Recycle (3R) principle, wherever viable. We do not use Deep Sea Tailings Placement (DSTP).

Mining and Industrial Waste

- The HPAL process yields a slurry that, after neutralisation, results in dischargeable water and dry stack tailing. Upon verification that the tailing meets all requirements of the toxicity test, it is handled as industrial waste from Special Specific Sources (non-toxic, non-flammable, non-explosive, reactive or corrosive).
- HPAL tailings are mainly stored in mined-out sites. However, where tailings disposal in other legally approved Dry Stack Tailings Facilities (DSTF) is proposed, we ensure that site selection ensures safe storage and that the impact on identified conservation values is managed and/or compensated.
- RKEF smelters yield nickel slag. It is a by-product for which various economic and non-economic uses are being developed. Where production of nickel slag is faster than its use, the nickel slag will be stored at permitted mined-out areas and non-mined areas (i.e. nickel slag dump facilities, NSDF).
- Feasibility studies which include slope stability will be undertaken to ensure all associated risks for DSTF and NSDF have been assessed and that recommendations are implemented. We will follow international best practices for safety monitoring and facilities closure.
- In line with the government's program for mineral conservation, we regularly review opportunities to lower our mine Cut-off Grade by taking into account smelting technology and economic value.
- Fly and bottom ash from processing facilities is fully reused. It is mixed with nickel slag to be formed into various useable by-products or used as nutrient enhancer for planting prior to backfilling to strengthen the paste consistency. It is also used for the production of artificial reef rocks.
- We assess, manage and monitor risks associated with backfilling, among others with Acid Rock Drainage (ARD) studies, securing required permits, assessment of geotechnical stability and monitoring of surface and ground water around the backfilling area.
- Hazardous waste, such as waste oil, chemical and medical waste, radioactive waste from our clinic, laboratories and workshops, is safely stored in dedicated depots prior to processing by approved and accredited third parties outside of Obi Island.

Limbah Lainnya

- Kami terus bekerja sama dengan pemerintah desa di sekitar kami untuk meningkatkan pengumpulan sampah rumah tangga.
- Setiap Tempat Pembuangan Sampah Terpadu memiliki kapasitas yang memadai untuk membakar sampah berbahaya secara aman dan mengolah sampah organik menjadi kompos.
- Besi tua dan limbah konstruksi dibawa ke luar Pulau Obi sesuai peraturan yang relevan.
- Kami tidak menganjurkan penggunaan produk akhir sekali pakai yang mengandung bahan baku kami, karena dapat didaur ulang dan hal ini dapat mengurangi kebutuhan untuk melakukan penambangan terbuka. Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan para pelaku rantai pasokan hilir untuk mendukung transisi menuju "Penambangan Urban".

2.8 Penutupan dan Reklamasi Tambang

Proses HPAL memungkinkan kami untuk memperpanjang umur ekonomis mulut tambang, tetapi setelah sumber daya mineralnya diekstraksi, kami memulihkan lokasi penambangan beserta tutupan pohonnya. Ini sesuai dengan persyaratan undang-undang dan merupakan bagian integral dari proses penambangan yang sedang berlangsung:

- Rencana Penutupan Tambang dan Reklamasi kami berlaku untuk semua operasi eksplorasi dan penambangan kami. Ini termasuk bekas lokasi penambangan yang akan dialokasikan untuk penggunaan lahan lain, yaitu Kawasan Industri Pulau Obi.
- Reklamasi memulihkan topografi umum dari area asli sebelum penambangan, dengan beberapa pengecualian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari penilaian risiko bencana kami, stabilitas tanah di lokasi reklamasi dipantau secara berkala.
- Dalam melakukan reboisasi, kami menghindari penanaman monokultur dan penggunaan spesies eksotik. Kami juga mengambil tindakan untuk membatasi penyebaran spesies invasif. Kami secara proaktif mengelola area yang sebelumnya dihutankan kembali, menggunakan teknik regenerasi alami yang dibantu untuk mendorong pertumbuhan kembali dan suksesi pohon.
- Sejalan dengan persyaratan undang-undang, kami mencadangkan anggaran yang nilainya sesuai untuk melaksanakan Rencana Penutupan Tambang dan Reklamasi kami. Penggunaan anggarannya dilaporkan dalam laporan tahunan kami.
- Kami akan melaporkan kemajuan langkah-langkah penutupan tambang, reklamasi, dan perubahan penggunaan lahan (baik secara administratif maupun fisik) setiap tahunnya. Setiap laporan kemajuan akan memuat peta yang dapat diverifikasi.

Other Waste

- We continue to work with the local governments of the villages in our vicinity to improve household waste collection.
- Each Integrated Waste Disposal site has adequate capacity to safely incinerate hazardous waste and to process organic waste into compost.
- Scrap metal and construction waste is taken outside of Obi Island according to relevant regulations.
- We discourage single use of the final products that contain our raw materials, for these are recyclable and this can lessen the need for open pit mining. We commit to collaborating with downstream supply chain actors to support the transition to "Urban Mining".

2.8 Mine Closure and Reclamation

The HPAL process enables us to extend the economic life of mining pits, but once valuable minerals have been extracted, we restore the mining site along with its tree cover. This is a legal requirement and an integral part of the ongoing mining process:

- Our Mine Closure and Reclamation Plan applies to all our exploration and mining operations. This includes former mining sites that will be allocated to other land use, i.e. the Obi Island Industrial Park.
- Reclamation restores the general topography of the original area prior to mining, justified exceptions aside. As part of our disaster risk assessment, the stability of the soil in reclamation sites is regularly monitored.
- In reforestation, we avoid monocultures and the use of exotic species and we take measures to restrict the spread of invasive species. We proactively manage previously reforested areas, using assisted natural regeneration techniques to promote tree regrowth and succession.
- In line with legal requirements, appropriate budget for the implementation of our Mine Closure and Reclamation Plan is reserved and reported on in our annual report.
- We will report on progress with mine closure, reclamation and (administrative and physical) land use changes on an annual basis. Each progress report will contain verifiable maps.

3. KETENTUAN KETENAGAKERJAAN

Employment Terms

3.1 Kompensasi

Keberhasilan Perusahaan sangat bergantung pada kemampuan dan motivasi karyawan kami. Kami menciptakan kesempatan kerja yang bermanfaat bagi pekerja, pemasok, dan kontraktor. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil dan setara setiap saat, sebagai berikut:

- Kami membayar upah yang melebihi upah minimum regional Indonesia.
- Kami menjamin pembayaran yang setara untuk persyaratan kerja yang setara, terlepas dari jenis kelamin.
- Kami menyediakan tempat tinggal gratis untuk karyawan di lokasi kami yang meliputi makan, jasa binatu, dan jasa tata graha. Kami pun menyediakan layanan perawatan kesehatan gratis, fasilitas olahraga, dan fasilitas keagamaan.
- Kami meringankan beban pengasuhan anak karyawan dengan menyediakan layanan Kesehatan.
- Kami menawarkan kesempatan pelatihan selain program beasiswa bagi karyawan kami untuk meningkatkan pendidikan mereka.
- Kami akan menentukan daya saing kami dengan menilai tingkat upah yang berlaku untuk berbagai posisi pekerjaan.

3.2 Jam Kerja dan Cuti

- Kami menjaga total jam kerja reguler dan lembur karyawan sejalan dengan peraturan Indonesia.
- Karena aset prioritas kami terletak di daerah terpencil, kami berkomitmen untuk menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan perpanjangan jam kerja dengan berkonsultasi dengan para pekerja kami untuk meminimalkan dampak jam kerja yang lebih panjang terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.
- Kami memastikan bahwa kerja lembur hanya dilakukan secara sukarela, dan kami memberikan hari istirahat setiap secara periodik beserta cuti tahunan.

3.3 Rekrutmen

- Sejalan dengan ketentuan kebijakan/izin pemerintah, kami memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal dan pemasok lokal di wilayah operasi kami.
- Kami tidak bekerja sama dengan agen rekrutmen tenaga kerja. Jika kami melakukannya, maka biaya rekrutmen akan ditanggung oleh Perusahaan.
- Kami memastikan bahwa semua karyawan baru memahami semua hak, kesempatan, dan kewajiban ketenagakerjaan mereka.
- Kami bertujuan untuk mempekerjakan karyawan tetap sebagai mayoritas dari tenaga kerja kami, dan kami mengupayakannya dengan meningkatkan jumlah karyawan tetap secara bertahap.

3.1 Compensation

The success of the Company greatly depends on our employees' capabilities and motivation. We create worthwhile employment opportunities for our workers, suppliers and contractors. We commit to upholding fair and equitable employment terms at all times, as follows:

- We pay wages that exceed the Indonesian regional minimum wage.
- We guarantee equal payment for equivalent employment terms, regardless of gender.
- We provide free housing for our on-site employees that include meals, laundry and housekeeping, and we also provide free health care, sports facilities, and religious facilities.
- We relieve employees' child care burden through the provision of health.
- We offer opportunities for training in addition to a scholarship program for our employees to enhance their education.
- We will determine our competitiveness by assessing the prevailing wage rate for a range of employment positions.

3.2 Working Hours and Leave

- We keep employees' total regular and overtime working hours in line with Indonesian regulations.
- As our priority assets are located in remote areas, we commit to assessing and managing risk associated with extended working hours in consultation with our workers to minimise the impact of longer working hours on the health, safety and welfare of workers.
- We ensure that overtime is voluntary, and we provide periodical rest day and annual leave.

3.3 Recruitment

- In line with government policy/permit terms, we prioritise employment of the local workforce and local suppliers in the region of our operations.
- We do not work with recruitment agencies. In the event we were to do so, recruitment fees will be borne by the Company.
- We ensure that all new employees understand their labour rights, opportunities and obligations.
- We aim for the highest possible share of permanent employment, which is achieved through incremental advancement of the permanency of employment.
- Our HR policy ensures that terms of employment are

- Kebijakan SDM kami memastikan bahwa syarat-syarat untuk bekerja hanya didasarkan pada kualifikasi profesional dari calon karyawan dan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan. Ini menyiratkan bahwa kelompok rentan (termasuk pekerja penyandang disabilitas) diperlakukan sebagaimana mestinya.
- Kami secara teratur menilai kembali risiko ketentuan dan praktik ketenagakerjaan yang tidak diperbolehkan di seluruh operasi kami, termasuk yang dilakukan oleh pemasok dan kontraktor kami.
- Kami melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk dipekerjakan dalam operasi kami.
- Kami mendukung dan menjunjung tinggi Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia yang tidak memberikan toleransi kepada praktik mempekerjakan anak-anak dan kerja paksa.
- Kami melarang segala jenis diskriminasi dalam praktik ketenagakerjaan.⁽⁹⁾ Perilaku lainnya yang tidak dapat diterima di Perusahaan ditentukan dalam Kode Etik dan Perilaku kami.

3.4 Hak untuk Berserikat

- Hubungan antara pemberi kerja dan karyawan yang berlaku di Perusahaan didasarkan pada dialog secara reguler, terbuka, dan informal, seperti yang umum dilakukan di Indonesia. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa masukan yang diterima dan kesepakatan yang dibuat selama dialog tersebut didokumentasikan dan ditindaklanjuti semestinya.
- Kami sepenuhnya menerima hak karyawan untuk menjalankan kebebasan berserikat dan untuk berunding bersama, dan kami akan menghormati dan memfasilitasi kebutuhan dan hak serikat kerja.

exclusively based on a candidate/employees' professional qualifications and ability to perform the job. This implies that vulnerable groups (including workers with disabilities) are treated accordingly.

- We regularly re-assess the risk of unpermitted employment terms and practices throughout our operations, including those of our suppliers and contractors.
- We prohibit the employment of children under the age of 18.
- We support and uphold the Indonesian Manpower Law which stipulates zero tolerance to child labour and forced labour practices.
- We prohibit any type of discrimination in our employment practices.⁽⁹⁾ Other unacceptable behaviour is specified in our Code of Ethics and Conduct.

3.4 Right to Self-organise

- Our employer-employee relationship is based on regular, open, informal dialogue, as commonly practiced in Indonesia. We commit to ensuring that inputs received and agreements made during such dialogue are documented and acted upon.
- We fully accept employees' rights to exercise their freedom of association and to collective bargaining, and we will respect and facilitate an employees' union needs and rights.

³ Discrimination on the grounds of ethnicity, national origin, gender, sexual orientation, religious belief, union affiliation, political or ideological beliefs, social class, conditions with special needs, marital status or age.

⁹ Diskriminasi atas dasar suku, asal negara, jenis kelamin, orientasi seksual, agama/kepercayaan, afiliasi dengan serikat kerja, prinsip politik dan ideologi, kelas sosial, kondisi kebutuhan khusus, status pernikahan, atau usia.

4. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Occupational Health and Safety (OHS)

Operasi kami melibatkan kegiatan berisiko tinggi dalam bidang pertambangan, peleburan, dan pemurnian. Program Keselamatan Kerja kami bertujuan untuk menciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja yang mendorong karyawan kami untuk memperhitungkan risiko K3 dan Keselamatan Operasional secara serius. Kami bangga dengan prestasi tingkat kecelakaan kerja yang rendah.

4.1 Sistem Manajemen K3

- Sistem manajemen K3 kami selaras dengan peraturan nasional (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja: SMK3) dan kerangka praktik terbaik yang diterima secara internasional, ISO 45001.
- Program Keselamatan Kerja kami memastikan ketersediaan peralatan pelindung, inspeksi dan audit, pengujian peralatan dan sertifikasi fasilitas serta pelatihan reguler.
- Semua manajer dan karyawan utama kami di lokasi telah dilatih untuk mengamati dan menanggapi risiko K3.
- Kami memastikan bahwa semua karyawan, kontraktor, pemasok, dan pengunjung ke lokasi kami mematuhi Program Keselamatan Kerja kami.
- Kami rutin meninjau, menguji, dan memperbarui Penilaian Risiko Bahaya untuk semua operasi kami, dan mendorong semua pekerja kami untuk melaporkan kekhawatiran mereka dan insiden yang terjadi.

4.2 Kesehatan Karyawan

- Kami menghadirkan lingkungan kerja yang bersih dan sehat dan menyediakan APD atas biaya Perusahaan dan mewajibkan penggunaannya secara konsisten.
- Semua karyawan Perusahaan diasuransikan dalam skema asuransi kesehatan Indonesia yang dikelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) dan asuransi kesehatan tambahan juga tersedia bagi karyawan tetap dan keluarganya. Karyawan kami dapat mengajukan permohonan cuti sakit sesuai dengan kebijakan Sumber Daya Manusia kami.
- Kami mengoperasikan klinik medis 24 jam di lokasi, lengkap dengan paramedis, serta laboratorium medis yang lengkap. Kami melakukan pemeriksaan kesehatan dasar untuk semua karyawan kami dan kemudian pemeriksaan selektif untuk memantau setiap gejala penurunan kesehatan, terutama yang disebabkan oleh kegiatan terkait pekerjaan.
- Kami memberikan vaksinasi gratis kepada semua pekerja dan kontraktor kami untuk menangkal paparan virus Covid-19. Kami akan memperluas cakupan SOP kami untuk vaksinasi terhadap Covid-19 dalam rangka mengantisipasi timbulnya penyebaran di masa mendatang.
- Sejalan dengan kebijakan Sumber Daya Manusia kami, kami memberikan kompensasi yang adil bagi korban cedera dan lumpuh dan/atau meninggal akibat kecelakaan kerja.

Our operations involve high-risk activities in mining, smelting and refining. Our Work Safety Program aims to create a strong OHS culture in the workplace that encourages our employees to take OHS and Operational Safety (OS) risk seriously. We pride in achieving a low accident rate.

4.1 OHS Management System

- Our OHS management system is aligned with national regulations (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja: SMK3) and the internationally accepted best practice framework, ISO 45001.
- Our Work Safety Program caters for the availability of protective equipment, inspections and audits, equipment testing and certification of facilities and regular training.
- All our key managers and employees on-site are trained to observe and respond to OHS risk.
- We ensure that all employees, contractors, suppliers and visitors comply with our Work Safety Program.
- We regularly review, test and refresh our Hazard Risk Assessment for all our operations, and we encourage all our workers to report concerns and incidents.

4.2 Employees' Health

- We provide a clean and healthy working environment and we provide PPE at the expense of the Company and enforce its consistent use.
- All company employees are insured under the Indonesian health insurance scheme under BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) and additional medical health insurance is provided for permanent employees and their families. Our employees may request to apply for sick leave as per our Human Resources policy.
- We operate an on-site 24-hour medical clinic with paramedics and a fully equipped medical laboratory. We conduct a baseline medical check ups for all our employees and subsequently selective checks to monitor any deterioration in health, especially when caused by work-related activities.
- We provide free vaccination of all our workers and contractors to counter exposure to Covid-19 virus. We will generalise our SOP for vaccination against Covid-19 in anticipation of potential future outbreaks.
- In line with our Human Resources policy, we provide fair compensation for the injured and incapacitated and/or fatal victims of work-related accidents.
- We ensure that every individual employee's medical history

- Kami memastikan bahwa riwayat kesehatan setiap karyawan dirahasiakan, namun dapat diakses oleh karyawan dan staf medis yang diberi wewenang. Kami menyimpan semua catatan terkait K3 dan kesehatan selama 10 tahun berbentuk fisik dan 30 tahun berbentuk digital.⁽¹⁰⁾ Data ini tetap dapat diakses oleh staf yang diberi wewenang. Seluruh data tersebut digunakan untuk pelaporan ke otoritas terkait dan untuk laporan keberlanjutan kami.
- Kami akan memulai program penelitian kesehatan jangka panjang yang ditujukan untuk menyelidiki dan memverifikasi risiko kesehatan yang terkait dengan operasi kami, menggunakan data kesehatan dasar kami dan beberapa referensi.

4.3 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Rendahnya tingkat kejadian darurat di wilayah operasional kami mencerminkan kesiapan kami dalam menanggapi keadaan darurat. Namun, kami tetap waspada dalam memperbarui dan menguji Rencana Tanggap Darurat (ERP) kami, dengan mempertimbangkan semua risiko bencana, termasuk bencana alam (terutama gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kebakaran lahan, dan angin topan), dan lainnya (kecelakaan besar, pemberontakan).

- ERP kami selaras dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pedoman EHS Bank Dunia, dan Pedoman UNEP tentang Kesadaran dan Kesiapsiagaan untuk Keadaan Darurat di Tingkat Lokal (APELL). Semua skenario bencana mencakup penilaian potensi dampak terhadap Perusahaan, masyarakat, dan lingkungan setempat. Kami memperbarui ERP setidaknya setiap 24 bulan sekali.
- ERP kami mewajibkan keberadaan suatu tim terlatih yang anggotanya mewakili semua bidang keahlian. Kami secara teratur melakukan simulasi penanganan situasi tanggap darurat dan untuk menyelidiki setiap insiden yang mencakup nyaris celaka, kecelakaan kecil, kecelakaan besar, dan kematian, serta untuk menyesuaikan prosedur operasional kami. Kami menyelidiki insiden dan secara teratur berkonsultasi dengan karyawan kami yang paling terpapar risiko dan menerapkan rekomendasi mereka ke dalam ERP kami.
- Cakupan ERP kami mencakup keadaan darurat di desa-desa di sekitar wilayah operasi kami, terlepas dari penyebab keadaan darurat tersebut. Kami memastikan bahwa para kepala desa mengetahui prosedur terkait yang paling baru.
- Perusahaan telah menyisihkan sejumlah dana untuk menanggapi kejadian atau bencana lingkungan, sebagaimana

is kept confidential, but is accessible to the employee and mandated medical staff. We keep all OHS and health related records for a period of 10 years physically and 30 years digitally.⁽⁴⁾ These data remain accessible to mandated staff. Aggregated data are used for reporting to relevant authorities and for our sustainability reports.

- We will commence a long-term health research program that is dedicated to investigating and verifying health risk associated with our operations, using our baseline health data and reference areas.

4.3 Emergency Preparedness and Response

A low rate of emergency events in our operational area reflects our preparedness to respond to emergencies. However, we remain vigilant in updating and testing our Emergency Response Plan (ERP), taking into account all disaster risk, including natural disasters (notably earthquakes, tsunami, landslides, flooding, land fires and cyclones), and others (major accidents, insurgence).

- Our ERP is aligned with legislation set out by the National Agency for Disaster Countermeasure (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), the World Bank EHS Guidelines, and UNEP Guidelines on Awareness and Preparedness for Emergencies at the Local Level (APELL). All disaster scenarios include an assessment of potential impact on the Company, community and local environment. We update our ERP at least every 24 months.
- Our ERP mandates a well-trained team whose members represent all fields of expertise. We regularly simulate handling of emergency response situations and to investigate every incident that includes near misses, minor accidents, major accidents, and fatalities and to adjust our operational procedures accordingly. We investigate incidents and regularly consult with our employees who are most exposed to risk and incorporate their recommendations in our ERP.
- The scope of our ERP includes emergencies in the villages in the vicinity of our operations, regardless of the cause of emergency. We ensure that village leaders are aware of the most up to date procedures.
- The Company has set aside a financial provision for environmental incidents or disasters, as required by law. This is to cover expenses incurred due to on-site accidents and

⁴ This includes: health and safety risk assessments; workplace monitoring and workers' health surveillance results; and data related to occupational injuries, diseases, accidents, fatalities and dangerous occurrences.

¹⁰ Diskriminasi atas dasar suku, asal negara, jenis kelamin, orientasi seksual, agama/kepercayaan, afiliasi dengan serikat kerja, prinsip politik dan ideologi, kelas sosial, kondisi kebutuhan khusus, status pernikahan, atau usia.

diwajibkan oleh undang-undang. Dana tersebut dapat digunakan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya kecelakaan dan bencana di lokasi, seperti kerusakan akibat banjir, kebakaran, tanah longsor, penurunan muka tanah, kegagalan fasilitas limbah tambang, tumpahan besar cairan dari proses, tangki bocor, dan potensi kecelakaan lainnya. Pencadangan dana ini dilaporkan dalam Laporan Tahunan kami.

disasters, such as flood damage, fires, landslides, subsidence, mine waste facility failures, major spills of process solutions, leaking tanks, and other potential accidents. This provisioning is reported on in our Annual Report.

5. Mendukung Kelompok Masyarakat Supporting Communities

5.1 Melindungi Kesehatan Masyarakat

Kesehatan dan keselamatan kelompok masyarakat di sekitar operasi kami penting bagi kami. Banyak fasilitas K3 kami yang tersedia untuk penduduk desa melalui Pusat Kesehatan Terpadu kami:

- Kami secara rutin mengunjungi desa-desa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat, dan melaporkan kembali kepada pemerintah desa tentang masalah yang menjadi perhatian di tingkat masyarakat.
- Ambulans dan prosedur evakuasi kami dapat digunakan apabila terjadi penyakit atau kecelakaan yang mendesak.
- Riwayat medis anggota komunitas dijaga kerahasiaannya. Data secara keseluruhan dapat digunakan untuk memantau dan melaporkan tren kesehatan di tingkat masyarakat.
- Kami memberikan vaksinasi gratis kepada semua anggota masyarakat di sekitar wilayah operasi kami.

5.2 Mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

Kami menghormati hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam Deklarasi PBB tahun 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Secara khusus:

- Kami akan menilai keberadaan masyarakat adat⁽⁵⁾ sebelum melakukan pengembangan, dan memastikan bahwa kelompok masyarakat tersebut menyadari hak mereka untuk tidak menyetujui setiap pembangunan yang diusulkan apabila hal tersebut dapat mempengaruhi tanah adat, warisan budaya, atau pilihan mata pencaharian mereka.
- Kami menghormati hak masyarakat untuk menunjuk perwakilan mereka sendiri dan kami memberikan sarana yang wajar (transportasi, akomodasi, tunjangan) kepada mereka untuk berinteraksi dengan Perusahaan dalam proses yang transparan. Proses interaksi dalam rangka memperoleh PADIATAPA untuk pengembangan yang diusulkan akan didokumentasikan, dan materinya akan dapat diakses oleh masyarakat.
- Apabila proposal pengembangan tertentu belum disetujui oleh masyarakat adat, maka pelaksanaan proposal tersebut akan ditangguhkan sambil menunggu perencanaan dan/atau negosiasi lebih lanjut, atau dibatalkan seluruhnya.
- Apabila operasi kami ada yang memengaruhi hak atas tanah dari anggota masyarakat non-pribumi, kami akan meminta PADIATAPA mereka untuk operasi yang diusulkan tersebut, menggunakan undang-undang di Indonesia sebagai kerangka referensi untuk mengatur kompensasinya.

5.1 Protecting Community Health

The health and safety of communities in the vicinity of our operations is important to us. Many of our OHS facilities are available to villagers through our Integrated Healthcare Centre:

- We regularly visit the village areas to conduct community health checks, and report back to the village government about issues of concern at community level.
- Our ambulance and evacuation procedure can be resorted to in the event of urgent illness or accidents.
- Individual community members' medical history is kept strictly confidential. Aggregated data may be used to monitor and report health trends at community level.
- We provide free vaccinations to all community members in the vicinity of our operations.

5.2 Securing Free, Prior and Informed Consent (FPIC)

We respect indigenous peoples' rights set out in the 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Specifically:

- We will assess the presence of indigenous communities⁽⁵⁾ prior to development, and ensure that such communities are aware of their right to withhold their consent for any proposed development should this affect their customary rights land, cultural heritage or livelihood options.
- We respect the communities' right to appoint their own representatives and we provide them with reasonable means (transportation, accommodation, allowances) to engage the Company in a transparent process. The process of engagement to seek FPIC for a proposed development will be documented with material made available to the community.
- In the event consent for a certain development is withheld by an indigenous community, the execution of the proposed development will be suspended pending further planning and/or negotiations, or be cancelled.
- Where our operations affect the land rights of non-indigenous community members, we will secure their FPIC for proposed operations, whereby mainstream Indonesian legislation serves as the reference framework for settling compensation.

5.3 Menjaga Warisan Budaya

Selama berabad-abad, situs-situs warisan budaya telah ada di dekat lokasi operasi kami, beberapa di antaranya baru ditemukan dalam beberapa tahun terakhir.

- Kami berkomitmen untuk mengidentifikasi, menjaga, dan memelihara situs-situs warisan budaya tersebut.
- Kami menghormati dan mendukung praktik-praktik budaya dari masyarakat lokal, dan mendukung pelestarian dan pemanfaatannya secara berkelanjutan, apabila memungkinkan.

5.4 Pengembangan Masyarakat

Perusahaan telah membawa perubahan besar pada lanskap fisik dan sosial ekonomi di Pulau Obi. Kami menyadari perlunya membantu masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Kami melakukannya dengan berkonsultasi dan bekerja sama dengan mereka:

- Kami melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat melalui kerja sama dengan masyarakat setempat dan pemerintah desa berdasarkan tata kelola yang baik, pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, perencanaan, serta dokumentasi. Program ini diselaraskan dengan budaya dan praktik lokal, serta terbebas dari preferensi terhadap agama, budaya, dan faktor ekonomi tertentu.
- Kami berinteraksi secara rutin dengan lembaga pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten untuk membahas pembangunan berkelanjutan di Pulau Obi, dan kami memberikan pelatihan kelembagaan dan dukungan bagi pemerintah desa untuk membantu mereka mengikuti laju perkembangan industri regional di sekitar desa mereka.
- Program Pengembangan Masyarakat kami berfokus pada kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Kami menghindari terciptanya ketergantungan terhadap bantuan, dan berusaha untuk mendorong terciptanya kemandirian, swakarsa, dan pengelolaan bersama dari usaha warga dan keluarga, pertanian yang berkelanjutan, dan konservasi. Apabila memungkinkan, proyek-proyek yang kami dukung disesuaikan dengan kebijakan, program, dan pendanaan dari pemerintah.

5.5 Pemukiman Kembali

Perusahaan telah memfasilitasi pemukiman kembali satu desa atas permintaan pemerintah, mengingat kedekatan desa tersebut dengan laut dan operasi industrial kami. Rencana pemukiman kembali tersebut telah dikembangkan melalui konsultasi dengan pemerintah desa dari masyarakat yang terdampak.

- Desa baru akan terbukti meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat asli. Pemeliharaan akan didasarkan pada kesepakatan yang ditandatangani bersama dengan pemerintah desa. Kami akan mengelola penutupan desa lama dengan hati-hati, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas pemerintah desa.
- Kami menyediakan fasilitas perumahan bagi semua karyawan

5.3 Maintaining Cultural Heritage

Over the centuries, sites of cultural heritage were created near the localities of our operations, some of which are newly discovered in recent years.

- We commit to the identification, conservation and maintenance of sites of cultural heritage.
- We respect and support local communities' cultural practices, and support their preservation and continued use, where appropriate.

5.4 Community Development

The Company brings about major changes in the physical and socio-economic landscape of Obi Island. We recognise the need to assist local communities to adapt to these changes and we do so in consultation and in cooperation with them:

- We implement our Community Development Program in collaboration with local communities and their village government based on good governance, consensus decision-making (*musyawarah*), planning and documentation. The Program is streamlined with local culture and practices, and free from religious, cultural and economic preference.
- We have regular interaction with national, provincial and district government agencies to discuss sustainable development on Obi Island and we provide institutional training and support for village government to assist them to keep up with the pace of regional-industrial development in the vicinity of their villages.
- Our Community Development Program focuses on the health, education and socio-economic wellbeing of the communities. We avoid a basic donor – receiver relationship and strive to promote self-reliance, own initiative and co-management of community and family businesses, sustainable agriculture and conservation. Where possible, supported projects match government policies, programs and funds.

5.5 Resettlement

The Company facilitated the resettlement of one village at the request of the government, in light of the village's close proximity to the sea and our industrial operations. The resettlement plan was developed in consultation with the village government of the affected community.

- The new village will demonstrably improve the original community members' standard of living. Maintenance will be based on mutually signed agreement with the village government. We will carefully manage the closure of the old village in close coordination with the village government authorities.
- We arrange for housing facilities for all our employees once

kami setelah mereka menandatangani kontrak. Kami akan melibatkan lembaga pemerintah untuk menyarankan aturan dan pendekatan yang sesuai untuk pemukiman lokal dan/atau pemulangan sukarela pencari kerja spontan.

they are contracted. We will engage with government agencies to suggest appropriate rules and approaches for the local settlement and/or voluntary repatriation of spontaneous job-seekers.

5.6 Tatalaksana Keamanan

Sebagai bagian dari Project Strategis Nasional & Object Vital Nasional di pulau obi, seluruh aset dan operasi kami tunduk pada tata laksana keamanan yang mengacu kepada Kepres 63 thn 2004 tentang Pengamanan Obvitnas, UU Kepolisian : Perkap no 24 thn 2007 tentang Sitem Manajemen Pengamanan , Perkap no 3 thn 2019 tentang Pemberian Bantuan Keamanan Obvitnas ,Perpol no, 4 thn 2020 tentang Pengamanan swakrasa serta ISPS Code : Pengelolaan Pengaman Pelabuhan. Manajemen pengamanan harus memastikan bahwa seluruh komponen yang terlibat harus memenuhi standard kualitas atau kemampuan yang telah di tetapkan, serta mempertimbangkan masukan dari departemen / Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.

- Pendekatan kami terhadap keamanan adalah memprioritaskan terhindarnya eskalasi konflik melalui pemeliharaan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, mengadakan dialog terbuka dan konstruktif secara rutin dengan karyawan dan komunitas lokal, menyelesaikan masalah berdasarkan musyawarah, dan menyediakan ruang dan sarana bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengaduan melalui prosedur pengaduan resmi kami.
- Perusahaan memastikan bahwa semua aparat keamanan – berikut para kepala desa – mengetahui pendekatan kami terhadap keamanan dan Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api.
- Perusahaan memastikan seluruh personel pengamanan yang terlibat menjunjung tinggi prinsip prinsip dasar kemanusiaan / Hak Asasi Manusia
- Di Indonesia, kehadiran satuan keamanan dalam rapat-rapat Perusahaan dengan pejabat pemerintah desa telah menjadi sesuatu yang umum. Dalam acara-acara tersebut, staf Perusahaan akan mengidentifikasi satuan pengamanan ini dan di awal setiap rapat akan meminta PADIATAPA dari para peserta untuk mengizinkan kehadiran satuan pengamanan ini. Jika PADIATAPA tidak diberikan, maka rapat akan dibubarkan.

5.6 Security Arrangements

As part of the National Strategic Project & National Vital Object on Obi Island, all of our assets and operations are subject to security management referring to Presidential Decree 63 of 2004 concerning Obvitnas Security, Police Law: Perkap no 24 of 2007 concerning Security Management Systems, Perkap no 3 of 2019 concerning Provision of Obvitnas Security Assistance, Perpol no. 4 of 2020 concerning voluntary security and the ISPS Code: Port Security Management. Security management must ensure that all components involved must comply the quality standards or capabilities that have been set, and consider input from the relevant department/agencies and applicable international regulations.

- Our approach to security is to prioritise avoidance of conflict escalation through maintaining excellent relations with our stakeholders, to have regular open, constructive dialogue with employees and local communities, to settle issues on the basis of consensus decision-making (musyawarah) and to maintain an open-door policy for stakeholders to use our formal grievance procedure.
- The Company ensures that all security forces – as well as heads of village government – are aware of our approach to security and the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms.
- The company ensures that all security personnel involved uphold the basic principles of humanity / human rights
- In Indonesia, it is common practice that security forces are present during company meetings with villager government officials. In such event, company staff will identify these forces and secure participants' FPIC for their presence at the start of every meeting, and otherwise dissolve the meeting.

⁵ Indigenous Peoples are distinct social and cultural groups that share collective ancestral ties to the lands and natural resources where they live.

¹¹ Masyarakat Adat adalah kelompok-kelompok sosial dan budaya yang unik yang memiliki ikatan yang kuat secara turun-temurun dengan tanah dan sumber daya alam di tempat di mana mereka hidup.

6. KEPEDULIAN TERHADAP RANTAI PASOKAN Care for Our Supply Chain

6.1 Pengadaan yang Bertanggung Jawab

Operasi penambangan dan peleburan kami memerlukan input eksternal yang signifikan, seperti batubara, sulfat, kapur, bijih nikel tertentu, kompos, (bio)solar, dan materi konstruksi. Operasi kami di Pulau Obi selanjutnya menghasilkan permintaan lokal yang cukup besar untuk bahan pangan dan layanan pendukung. Kami menyadari perlunya mengelola daya beli kami.

Input Komoditas Utama

- Kami akan mengidentifikasi asal muasal input komoditas utama yang kami peroleh secara eksternal.
- Kami akan membuat profil risiko hukum dan keberlanjutan yang terkait dengan setiap komoditas utama beserta pemasoknya.
- Kami berkomitmen untuk meningkatkan profil keberlanjutan dari input komoditas utama kami melalui pelibatan kelompok pemasok.

Pengadaan Lokal

- Kami memprioritaskan pengadaan bahan pangan dan layanan secara lokal. Kami memperkuat dan memantau kapasitas masyarakat lokal di sekitar operasi kami dan, jika kapasitas mereka terlalu terbebani, kami untuk sementara dapat memprioritaskan pemasok dari skala regional untuk mengurangi beban terhadap pemasok lokal.
- Kami memastikan bahwa daya beli kami tidak sampai menimbulkan dampak sosial atau lingkungan setempat yang tidak semestinya, seperti pembukaan hutan, polusi, atau penangkapan ikan secara berlebihan. Kami tidak akan pernah membiarkan kebutuhan Perusahaan akan bahan pangan mengganggu ketahanan pangan masyarakat lokal.

Kode Etik LST Pemasok dan Kontraktor

- Kami akan mengembangkan Pedoman Perilaku LST Pemasok dan Kontraktor yang selaras dengan Kebijakan Keberlanjutan ini, selain Pakta Integritas untuk para pemasok dan kontraktor. Setiap pemasok akan diminta untuk menandatangani Kode Etik tersebut.
- Pelatihan pengenalan dan penyegaran akan diberikan kepada para pemasok kami untuk memastikan bahwa mereka memahami Kebijakan Keberlanjutan dan Kode Etik kami.
- Kami akan meninjau kepatuhan mereka setiap tahun dan menerbitkan kartu laporan, beserta daftar hal-hal yang perlu diperbaiki.

6.2 Memampukan Ketertelusuran Produk

Produk setengah jadi buatan kami digunakan dalam baterai EV dan produk lainnya yang pada akhirnya akan tercakup dalam

6.1 Responsible Procurement

Our mining and smelter operations require significant external inputs such as coal, sulphate, lime, certain nickel ores, compost, (bio)diesel and construction materials. Our operations on Obi Island furthermore generate considerable local demand for food products and supporting services. We recognise the need to manage our purchasing power.

Main Commodity Inputs

- We will identify the ultimate origin of the main commodity inputs procured externally.
- We will conduct a legal and sustainability risk profile for each main commodity and its suppliers.
- We commit to improving the sustainability profile of our main commodity inputs through supplier engagement.

Local Procurement

- We prioritise local procurement of food stuffs and services. We strengthen and monitor the capacity of local communities in the vicinity of our operations and, should their capacity be overstretched, we may temporarily prioritise regional suppliers to alleviate pressure on local suppliers.
- We ensure that our purchasing power does not result in undue local social or environmental impact such as forest clearance, pollution or overfishing. We will not allow the Company's demand to stress local food security at any time.

Supplier and Contractor ESG Code of Conduct

- We will develop a Supplier and Contractor ESG Code of Conduct that is aligned with this Sustainability Policy, in addition to the Integrity Pact for suppliers and contractors. Each supplier will be required to sign the Code.
- Introduction and refresher trainings will be provided to our suppliers to ensure they are familiar with our Sustainability Policy and the Code.
- We will review compliance annually and issue report cards, along with a list of required improvements.

6.2 Enabling Product Traceability

Our semi-finished products are used in Electric Vehicle batteries and other products that will eventually be subject to our final

program manajemen siklus hidup pelanggan akhir kami. Kami berkomitmen untuk berkontribusi pada program tersebut agar dapat mendorong transparansi rantai pasokan:

- Kami berkomitmen untuk mengembangkan dan memelihara sistem ketertelusuran yang memungkinkan pelacakan kumpulan mineral/logam dari mulut tambang yang aktif hingga titik pemrosesan, dan pelacakan lanjutannya dari bahan mentah campuran setengah jadi.

customers' lifecycle management programs. We commit to contributing to such programs so as to promote supply chain transparency:

- We commit to developing and maintaining a traceability system that enables approximate tracking of batches of minerals/metals from active mining pits to the point of processing, and subsequent tracking of mixed semi-processed raw materials.

7. SIKLUS MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Cycle

Implementasi Kebijakan Keberlanjutan ini mengikuti siklus manajemen risiko yang mendukung berlangsungnya penyempurnaan secara berkelanjutan.

The implementation of this Sustainability Policy follows a risk management cycle that drives continual improvement.

7.1 Penilaian Risiko

- Untuk sebagian besar aspek kebijakan keberlanjutan kami, penilaian risiko menjadi bagian integral dari bisnis kami, sekaligus diwajibkan oleh undang-undang.
- Lingkup penilaian risiko kami berfokus pada operasi kami dalam batas-batas perizinan, tetapi juga secara eksplisit mempertimbangkan dampak dan pengaruh eksternal.
- Kami mendorong semua manajer, pekerja, dan pemasok kami untuk menilai dan melaporkan semua dugaan adanya risiko keberlanjutan kepada manajemen, tanpa kecuali.
- Apabila keahlian internal kami ternyata terbatas, kami akan berkonsultasi dengan pakar eksternal (akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah, dan/atau penilai terakreditasi) untuk meningkatkan wawasan kami di bidang risiko tertentu.
- Kami memverifikasi latar belakang profesional dari pakar ilmu eksternal, dan kami memprioritaskan penggunaan laboratorium dan penilai yang terakreditasi dan bersertifikat.

7.1 Risk Assessment

- For most aspects of our sustainability policy, risk assessment is an integral part of our business and a legal obligation.
- The scope of our risk assessment focuses on our operations within permit boundaries but also explicitly takes into account external impacts and influences.
- We encourage all our managers, workers and suppliers to assess and report suspected sustainability risk to management without reservation.
- Where our internal expertise is limited, we will consult external experts (academics and NGOs, government agencies and/or accredited assessors) to advance our insight in specific risk areas.
- We verify the professional credentials of external knowledge providers, and we prioritise the use of accredited and certified laboratories and assessors.

7.2 Konsultasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Kami menghargai keterlibatan konstruktif dengan para pemangku kepentingan kami, mulai dari penduduk desa di dekat wilayah operasi kami hingga pelanggan di pasar, serta dari pihak-pihak yang mendukung dan mengkritik kami.

7.2 Consultation and Stakeholder Engagement

We value constructive engagement with our stakeholders, from the villagers near our operations to our customers in the market place and from our supporters to our critics.

Rencana Identifikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

- Kami secara rutin memperbarui peta pemangku kepentingan untuk menentukan kebutuhan, perhatian, dan minat pemangku kepentingan kami dan untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi.
- Kami memprioritaskan identifikasi pemangku kepentingan lokal yang mungkin terdampak oleh kegiatan kami sebelum melakukan kegiatan tersebut. Kami memberikan perhatian lebih untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang rentan.
- Rencana keterlibatan pemangku kepentingan didasarkan pada sasaran-sasaran yang jujur. Kami menjaga transparansi tentang maksud dan operasi kami.

Stakeholder Identification and Engagement Plan

- We regularly update our stakeholder map to determine our stakeholders' needs, concerns and interests and to identify opportunities for collaboration.
- We prioritise the identification of local stakeholders who may be affected by our activities prior to undertaking these activities. We dedicate extra attention to identifying vulnerable stakeholders.
- Our stakeholder engagement plan is based on honest goals. We are transparent about our intent and our operations.

Norma-norma Pelibatan

- Kami menggunakan ISO 26000:2010 (Tanggung Jawab Sosial) sebagai panduan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bisnis kami.

Engagement Norms

- We use ISO 26000:2010 (Social Responsibility) as guidance for implementing social responsibility in our business.
- When we reach out to local communities to discuss

- Setiap kali kami menjangkau masyarakat lokal untuk membahas informasi dan mengambil keputusan bersama, kami memastikan bahwa kami mengikuti struktur pengambilan keputusan yang representatif sesuai pilihan dari masyarakat itu sendiri.
- Apabila diperlukan, kami dapat memberikan dukungan keuangan dan pengembangan kelembagaan untuk dapat membantu badan perwakilan pemangku kepentingan meningkatkan kapasitasnya atau berkegiatan.
- Kami menghormati adanya perbedaan pendapat. Kami ingin tetap menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan kami yang paling kritis sekalipun, agar dapat terus belajar dari pertukaran fakta dan pandangan.

Memfasilitasi Pemangku Kepentingan Eksternal

- Kami siap memfasilitasi kunjungan ke lokasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan jurnalis untuk melihat dan membahas masalah apa pun, dengan syarat mereka mematuhi kebijakan K3 dan perlindungan keamanan kami.
- Kami menanggapi permintaan informasi dan komentar spesifik dan tertulis dari pemangku kepentingan (dengar pendapat) dalam kerangka waktu yang wajar dan secara profesional (material dan lengkap).

Keterlibatan Industri

- Kami terlibat dalam diskusi dengan banyak perusahaan lain dan pemangku kepentingan dalam industri kami, di tingkat lokal, nasional dan internasional, untuk mendorong tercapainya tujuan keberlanjutan bersama. Kami tidak mendukung inisiatif industri kolektif yang ditujukan untuk melemahkan pemangku kepentingan yang kritis beserta pokok-pokok kekhawatiran mereka. Kami tidak membuat klaim keberlanjutan yang tidak berdasar.
- Kami berkomitmen untuk melibatkan perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di sekitar aset prioritas kami, dengan maksud untuk mendorong terciptanya pertukaran informasi keberlanjutan, dan kolaborasi dalam bidang-bidang kepentingan bersama.

7.3 Penetapan Sasaran dan Perencanaan Pengelolaan

- Untuk bidang-bidang kebijakan yang utama dalam dokumen kebijakan ini, akan ditetapkan sasaran-sasaran yang terukur, terikat waktu, dan terperinci, perencanaan manajemen operasional, dan, apabila diperlukan, Prosedur Operasional Standar (SOP).
- Kami memantau dan melaporkan kemajuan terhadap semua sasaran yang utama.

7.4 Pelatihan dan Sosialisasi

- Kami akan mengembangkan program pelatihan dan penyegaran bagi karyawan, kontraktor, dan pemasok kami

information and to take joint decisions, we assure ourselves that we follow representative decision-making structures of the communities' own choosing.

- When appropriate, we may provide financial and institutional development support to enable a stakeholders' representative body to enhance its capacity or to undertake activities.
- We respect dissent. We aim to stay on speaking terms with our most critical stakeholders to continue learning from exchange of facts and views.

Facilitating External Stakeholder Interest

- We are open to facilitate on-site visits by interested parties of standing, including academics, NGOs and journalists to view and discuss any concerns, provided that OHS and security safeguards are respected.
- We respond to stakeholders' specific, written requests for information and comment (due hearing) within reasonable time frames and in a professional manner (material and complete).

Industry Engagement

- We engage in discussions with other companies and stakeholders in our industry, at local, national and international level to promote the delivery of shared sustainability objectives. We refrain from supporting collective industry initiatives aimed at undermining critical stakeholders and their concerns. We refrain from making unsubstantiated sustainability claims.
- We commit to engaging other companies operating in the vicinity of our priority assets with the intent to promote the exchange of sustainability information and to collaborate in areas of common interest.

7.3 Target Setting and Management Planning

- Key policy areas in this policy document will be subject to setting of measurable, time-bound targets and detailed, operational management planning and, where required, Standard Operating Procedures (SOPs).
- We monitor and report on progress against all major targets.

7.4 Training and Socialisation

- We will develop training and refresher programs for our employees, contractors and suppliers to ensure that our

untuk memastikan bahwa Kebijakan Keberlanjutan kami benar-benar dipahami dan dipatuhi.

- Kami memberikan kesempatan pelatihan bagi anggota masyarakat setempat dan pejabat pemerintah desa untuk memperkuat kapasitas kelembagaan mereka.

7.5 Implementasi dan Inovasi

- Kami menerapkan rencana kerja dengan memastikan tersedianya sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya lainnya yang memadai bagi karyawan, pemasok, dan kontraktor kami.
- Implementasi kebijakan ini diawasi pada berbagai tingkatan, dengan jalur komunikasi yang jelas untuk memastikan adanya peringatan dini apabila terjadi keterlambatan, kegagalan, dll.
- Kami mendorong semua departemen, manajer, staf, dan pemasok untuk meneliti, mengusulkan, dan mencoba peluang-peluang untuk berinovasi.

7.6 Dokumentasi dan Pemantauan

- Kami akan mengembangkan Sistem Manajemen Dokumentasi yang mencakup semua bidang kebijakan utama yang diuraikan dalam Kebijakan Keberlanjutan ini.
- Selain memfasilitasi pemantauan dan pelaporan berkala, tujuan dari Sistem Manajemen Dokumentasi adalah untuk memungkinkan penelitian terhadap kegiatan kami dan dampaknya pada tingkatan bidang kebijakan masing-masing beserta keterkaitannya.

7.7 Pemastian, Pengungkapan, dan Pelaporan

- Sejalan dengan ketentuan dalam perizinan, kami secara rutin melaporkan berbagai aspek LST kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Minerba), dan departemen lain. Pemerintah melakukan pengawasan proaktif atas seluruh operasi kami.
- Kami akan memperoleh mempertahankan sertifikasi ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 45001 (K3) dan ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu) untuk unit-unit bisnis yang menjadi prioritas.
- Selain Laporan Keuangan Tahunan, kami juga akan menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahun.
- Setiap Laporan Keberlanjutan mengikuti standar umum dari Global Reporting Initiative (GRI). Kami akan mempertimbangkan untuk menggunakan Standar Sektor Pertambangan GRI apabila standar tersebut telah tersedia (di 2023).
- Setiap Laporan Keberlanjutan didasarkan pada swa-penilaian atas kinerja kami. Dipandu oleh indeks materialitas kami, verifikasi eksternal akan kami mintakan untuk subjek-subjek pelaporan tertentu setiap tahunnya. Proses verifikasi secara komprehensif akan dilakukan setiap tiga tahun sekali.

Sustainability Policy is understood and adhered to.

- We provide training opportunities for local community members and village government officials to strengthen their institutional capacity.

7.5 Implementation and Innovation

- We implement work plans by ensuring that adequate human, financial and other resources are available to our employees, suppliers and contractors.
- Implementation of this policy is subject to oversight at various levels, with clear lines of communication to secure early warning in the event of delay, failure, etc.
- We encourage all departments, managers, staff and suppliers to research, propose and trial options for innovation.

7.6 Documentation and Monitoring

- We will develop a Documentation Management System that covers all major policy areas outlined in this Sustainability Policy.
- Besides the facilitation of regular monitoring and reporting, the purpose of the Documentation Management System is to enable research into our activities and its impacts at the level of individual policy areas and their interrelations.

7.7 Assurance, Disclosure and Reporting

- In line with permit terms, we regularly report to the Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Delivery (KPPIP), the Ministry of Energy and Mineral Resources (Minerba) and other departments on most ESG matters. The Government exercises proactive oversight over our operations.
- We will secure and maintain certification for ISO 14001 (Environmental Management Systems), ISO 45001 (OHS) and ISO 9001 (Quality Management Systems) for priority business units.
- In addition to our Annual Financial Report, we will publish a Sustainability Report annually.
- Each Sustainability Report follows the general standards of the Global Reporting Initiative (GRI). When it becomes available (2023), we will consider using the GRI Mining Sector Standard.
- Each Sustainability Report is based on a self-assessment of our performance. Guided by our materiality index, we will commission external verification for selected subjects each year. A comprehensive verification will be conducted every three years.

7.8 Penyempurnaan yang Berkesinambungan

- Kami akan terus mengintegrasikan keberlanjutan dalam semua keputusan bisnis dan manajemen risiko perusahaan kami.
- Kebijakan keberlanjutan ini akan ditinjau secara berkala dan diperbarui sepenuhnya dalam lima tahun.

7.9 Penanganan Pengaduan

Operasi Perusahaan kami dikelola sesuai dengan praktik terbaik, tetapi kesalahan dapat terjadi dan kesalahpahaman dapat muncul. Para pihak dapat menggunakan mekanisme pengaduan kami, secara anonim jika diperlukan.

- Semua pemangku kepentingan, karyawan, anggota masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, kontraktor, akademisi, dll., memiliki akses ke mekanisme pengaduan kami untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, atau untuk mencari penyelesaian atau tindakan perbaikan. Kami menyelaraskan prosedur kami dengan Kriteria Ruggie untuk mekanisme pengaduan non-yudisial berbasis non-negara.⁽¹²⁾
- Mekanisme pengaduan reguler kami didasarkan pada interaksi langsung dengan pelapor, sementara pengaduan yang diajukan melalui prosedur *whistleblower* kami akan dilindungi oleh prinsip anonimitas.
- Mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan dalam bahasa dan format yang sesuai, sehingga cakupan, proses, dan hasil-hasil yang diharapkan semuanya menjadi jelas.
- Tim Audit Internal kami, yang ditugaskan untuk mengelola mekanisme pengaduan, juga tersedia untuk membantu penanganan konflik.
- Kami berkomitmen untuk menyelesaikan setiap pengaduan ataupun keluhan yang material dan relevan dalam jangka waktu yang wajar. Jika tidak ada jalan keluar yang dapat diterima oleh bersama melalui mekanisme dialog, maka kami akan mengupayakan tercapainya kesepakatan melalui mediator independen pihak ketiga ataupun cara lainnya yang dapat disepakati bersama.

7.8 Continuous Improvement

- We will continue to integrate sustainability in all our business decisions and enterprise risk management.
- This sustainability policy will be regularly reviewed and be fully updated in five years.

7.9 Complaints Handling

Our company's operations are managed according to best practices, but mistakes may happen and misunderstandings may arise. Parties may resort to our complaint mechanism, anonymously if so required.

- All our stakeholders, employees, local community members, NGOs, contractors, academics etc., have access our complaints mechanism to raise concerns or to seek resolution or remedy. We align our procedures with the so-called Ruggie Criteria for non-state based non-judicial grievance mechanisms.⁽⁶⁾
- Our regular complaints mechanism is based on direct interaction with the complainant, whilst complaints filed through our whistleblower procedure secure anonymity.
- The complaint mechanism is accessible to our stakeholders in appropriate languages and format, thereby clarifying scope, process and potential expected outcomes.
- Our Internal Audit team, who is tasked to manage the complaint mechanism, is also available to assist in conflict management.
- We commit to leaving no materially relevant complaint or grievance unresolved for unreasonable periods of time. If mutually acceptable remedies cannot be found through dialogue, we shall attempt to reach agreement through an independent, third-party mediator or another mutually acceptable means.

⁶ (a) Legitimate, (b) Accessible, (c) Predictable, (d) Equitable, (e) Transparent, (f) Rights-compatible, (g) A source of continuous learning, and (h) Based on engagement and dialogue.

¹²(a) Sah, (b) Mudah Diakses, (c) Dapat Diprediksi, (d) Adil dan Merata, (e) Transparan, (f) Sesuai dengan Hak-hak, (g) Sumber pembelajaran yang berkesinambungan, dan (h) Didasarkan pada pelibatan dan dialog.